

SKRIPSI

**IMPLIKASI YURIDIS PEMINDAHAN KEDUTAAN BESAR
AMERIKA SERIKAT DARI TEL AVIV KE YERUSALEM
(ANALISIS TERHADAP RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB
NO. 478 TAHUN 1980)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ADITYA CHANDRA DARMAWAN

135010107111052



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLIKASI YURIDIS PEMINDAHAN KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DARI TEL AVIV KE YERUSALEM (ANALISIS TERHADAP RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 478 Tahun 1980)

Oleh:

ADITYA CHANDRA DARMAWAN

135010107111052

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Setyo Widagdo. S.H., M.Hum
NIP. 195903201986011003

Dony Aditya Prasetyo, S.H., M.H.
NIK. 2012088601262001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH., M.Hum
NIP. 197808112002122001

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP. 196208051988021001

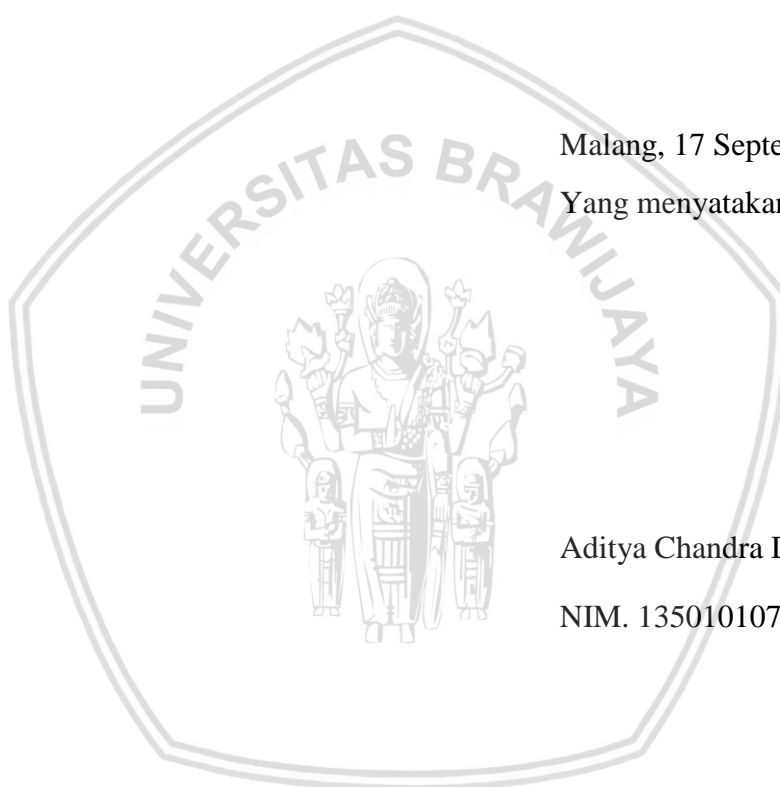
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 17 September 2018

Yang menyatakan,



Aditya Chandra Darmawan

NIM. 135010107111052

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan rahmat-Nya sehingga saya sampai ditahap penyusuna Laporan Penelitian Skripsi guna memperoleh gelar kesarjanaan Ilmu Hukum, yang berjudul **“IMPLIKASI YURIDIS PEMINDAHAN KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DARI TEL AVIV KE YERUSALEM (ANALISIS RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 478 TAHUN 1980)”**, dapat selesai dengan lancar. Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada:

1. Allah SWT atas limpahan berkahnya yang membuat segala hal menjadi lebih mudah.
2. Kepada keluarga saya, Mama saya Alif Fauziati, Bude saya Endah Herawaty dan adik – adik, Elvira dan Elvita yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada saya selama ini hingga dapat mencapai pada titik ini dan menjadikan saya pribadi yang sekarang ini. Semoga dengan mendapat gelar ini saya dapat lebih membanggakan dan membahagiakan kalian semua.
3. Pak Dr. Setyo Widagdo, SH, M.Hum. dan Pak Dony Aditya Prasetyo, SH, MH. selaku pembimbing saya selama penelitian skripsi. Terima kasih atas waktu dan tenaganya yang dengan sabar membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman rasa keluarga, yang tidak henti – hentinya menanyakan kapan saya akan pulang dan selesai kuliah dan selalu memberikan *support* kepada saya, Bimo, Erando, Masangger, Kareem yang sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri yang selama 10 tahun lebih sudah mau menemani

dan menjadi tempat dimana saya bisa belajar artinya teman dan mengajarkan saya banyak hal.

5. Teman – teman BSD dan sekitarnya, Sekbol, Aby, Anja, Tari, Shabrina, terima kasih karena telah menjadi teman yang baik selama ini. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Yaries yang sangat membantu dalam menulis skripsi ini dan juga Sekar Ayu Annisa a.k.a Issoi yang membantu saya dalam segala hal hingga dapat memperoleh gelar sarjana ini walaupun sangat bawel dan suka marah – marah tapi saya tau itu dilakukan untuk kebaikan saya sendiri. Terima kasih sekali lagi.
6. Teman – teman *National Board ALSA* Indonesia 2016 – 2017, Azman, Ami, Ai, Karmel, Yessi, Kiki, dan Najma yang bukan saja hanya memberikan pengalaman bekerja yang luar biasa namun telah menjadi teman – teman yang tidak bias saya lupakan.
7. Kepada kakak – kakak saya selama di Malang, Belan, Indri Zita, Saskia, Kak Gaga, Kak Dinta, Ahong dan lain – lain, terima kasih atas bimbingan dan ilmunya selama ini.
8. Teman – teman seperjuangan selama di Malang, Aldo, Romario, Benny, Demy, Alvin, Gilbert, terima kasih karena telah menemani saya selama ini dan menjadi tempat untuk berkeluh kesah selama di Malang.
9. Kawan-kawan LALALOLO Fadil, Kiki, Dongo, Tio, Rakha, Yoko, Bugit, Himsa, Faza, Capit, Farhan, Adit, Ipan. Terima kasih atas semua pembelajaran yang saya dapat dalam pertemanan yang penuh dengan gelak tawa ini. Semoga kalian sukses dengan jalan dan cara kalian masing-masing. Terima kasih juga untuk Iyam, Agung Lekong, yang walaupun

pertemuan singkat namun kalian sudah banyak mengajarkan dan memberikan *support* kepada saya. Semoga kalian sukses dan sehat selalu.

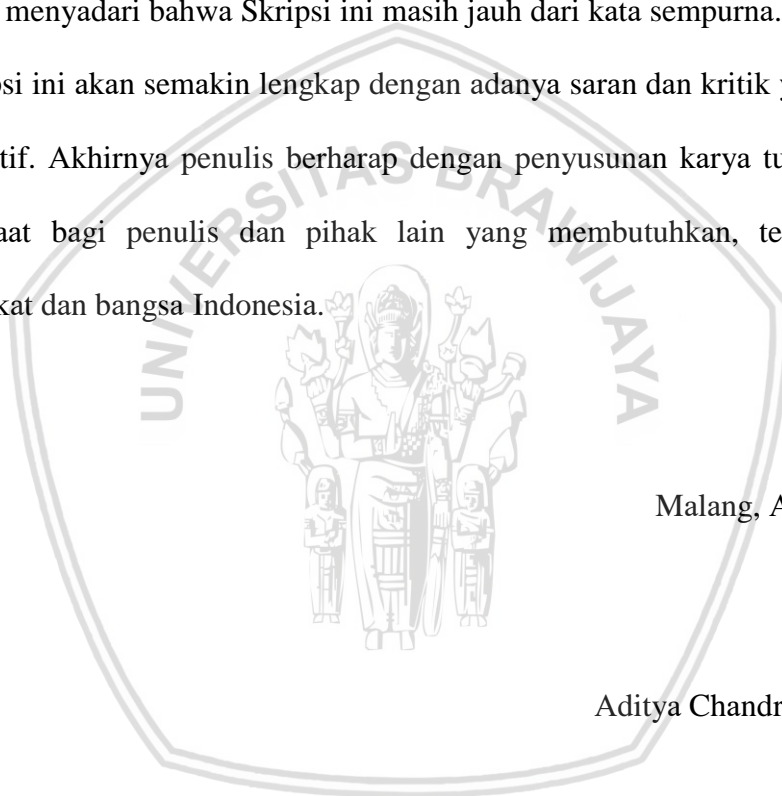
10. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya .

11. Ibu Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH, M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya .

Saya menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, skripsi ini akan semakin lengkap dengan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif. Akhirnya penulis berharap dengan penyusunan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan, terutama bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Malang, Agustus 2018

Aditya Chandra Darmawan



pertemuan singkat namun kalian sudah banyak mengajarkan dan memberikan *support* kepada saya. Semoga kalian sukses dan sehat selalu.

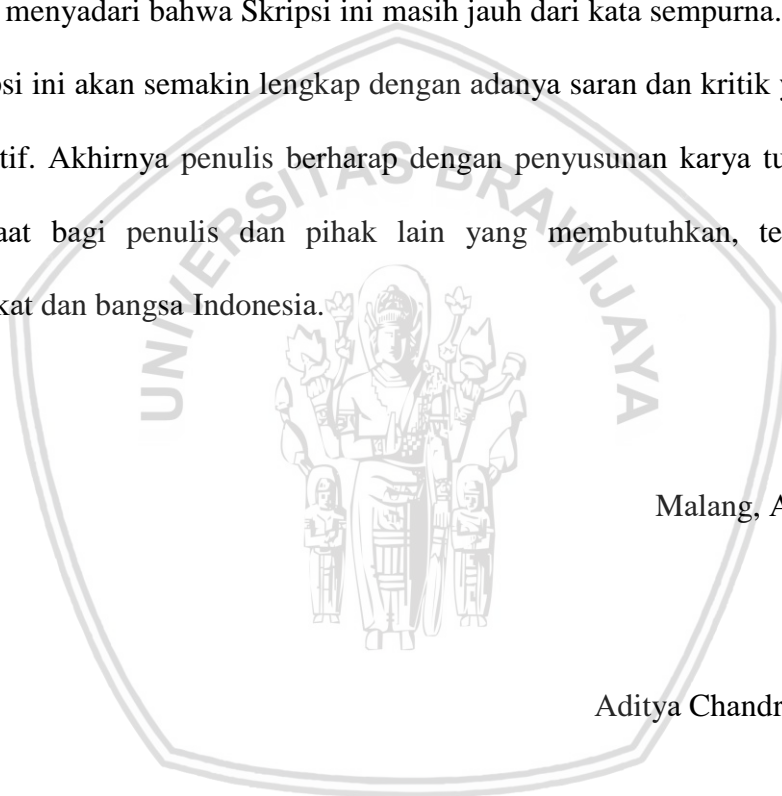
10. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya .

11. Ibu Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH, M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya .

Saya menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, skripsi ini akan semakin lengkap dengan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif. Akhirnya penulis berharap dengan penyusunan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan, terutama bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Malang, Agustus 2018

Aditya Chandra Darmawan



RINGKASAN

Aditya Chandra Darmawan, Hukum Internasional, Universitas Brawijaya, Agustus 2018, IMPLIKASI YURIDIS PEMINDAHAN KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DARI TEL AVIV KE YERUSALEM (ANALISIS TERHADAP RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 478 TAHUN 1980), Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum, Dony Aditya Prasetyo, S.H., M.H

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari tel Aviv ke Yerusalem menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 tahun 1980 sehingga bisa diketahui apakah pemindahan kedutaan tersebut sesuai dengan isi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 Tahun 1980 dan apa implikasi yuridis untuk perbuatan yang dilakukan oleh Amerika tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan hukum dan perjanjian internasional dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang diperoleh berupa bahan hukum primer melalui resolusi dan prinsip, bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan teknik analisis menggunakan metode deskriptif normatif.

Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa Amerika Serikat telah melanggar isi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 tahun 1980 karena status dari kota Yerusalem dan isi dalam resolusi yang tidak memperbolehkan suatu negara membuka perwakilan diplomatik di kota tersebut dan melanggar prinsip non-intervensi karena telah membuat aturan yang menentukan permasalahan di negara lain, serta Dewan Keamanan PBB dapat menjatuhkan sanksi sebagai implikasi yuridis yang harus di terima Amerika Serikat menurut Piagam PBB.

SUMMARY

Aditya Chandra Darmawan, International Law, Brawijaya University, August 2018, JURIDICAL IMPLICATIONS THE REMOVAL OF THE UNITED STATE OF AMERICA'S EMBASSY FROM TEL AVIV TO JERUSALEM (ANALYZED TO UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL NO. 478 ON 1980), Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum, Dony Aditya Prasetyo, S.H., M.H

The purposed of this study is to analyzed the relocation of the United States of America Embassy from Tel Aviv to Jerusalem according to UN Security Council Resolution 478 in 1980 so that we can known wether the relocation of US Embassy due to the United Nations Security Council 478 in 1980 and what the juridical implications for what deeds conducted by the United States of America, This type of research uses a legal juridical normative research with a statute approach method. Sources of legal material obtained in the form of primary legal material through the Act and Agreement, secondary law material through library studies relevant to the problems studied and tertiary legal matter. The author uses the analytical technique using normative descriptive method.

The results obtained in this study indicate that America have been violated the UN Security Council Resolution 478 in 1980 because of the status of Jerusalem is a holy city and the content of the resolution that not allowed any country to open their diplomatic mission in Jerusalem and America also violated the non-intervention principle because they made an act that determine other country issues, because of that UN Security Council can drop a sanctions as a juridical implication that the United States must accept according to the United Nations Charter

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Hukum Internasional	8
1. Definisi Hukum Internasional	8
2. Istilah – Istilah Hukum Internasional	9
3. Sumber Hukum Internasional.....	10
B. Hukum Diplomatik Internasional.....	24
1. Sejarah Perkembangan Hukum Diplomatik	24
2. Asas dalam Hukum Diplomatik	28
3. Sumber Hukum Diplomatik	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Jenis Bahan Hukum	32

D. Teknik Penulisan Bahan Hukum	33
E. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	33
F. Definisi Konseptual	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
A. Apakah Tindakan Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat Dari Tel Aviv Ke Yerusalem Sesuai Dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 Tahun 1980	35
1. Konflik Palestina dan Israel.....	35
2. Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 478 Tahun 1980	43
3. Tindakan Amerika Serikat di Tinjau Dari Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 478.....	45
B. Bagaimana Implikasi Yuridis Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem (Analisis Terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 Tahun 1980)	48
1. Kekuatan Resolusi Dewan Keamanan PBB.	48
2. Implikasi Yuridis Bagi Amerika Serikat (Anilisis Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 478 Tahun 1980)	55
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan negara-negara di dunia pasca perang dunia satu dan perang dunia dua terlihat sangat signifikan, sehingga mendorong semakin meningkatnya kebutuhan akan kerjasama internasional, yang biasa dikenal dengan hubungan internasional¹, merupakan bentuk dari kerjasama dan komunikasi yang formal dan diakui oleh setiap negara, untuk mengatur, menertibkan dan memelihara hubungan internasional ini dibutuhkan hukum guna menjamin unsur kepastian hukum bagi para pihak yang terkait. Hubungan internasional ini terjalin dengan diaturnya dalam hukum internasional² dengan adanya hukum internasional menjadikan kerjasama antar negara lebih aman dan terjamin dalam hal perlindungan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Usaha-usaha untuk menjalin kerjasama internasional telah ada sejak 1902 yang digagas oleh Liga Bangsa-Bangsa yang menghendaki kodifikasi hubungan internasional dengan adanya hukum kebiasaan internasional.³ Rumusan Liga Bangsa-Bangsa tersebut melahirkan konsep hubungan internasional dengan menempatkan wakil masing-masing

¹ Hata, *Hukum Internasional : Sejarah dan Perkembang Pasca Perang Dingin*, Setara Press, Malang, 2012, hlm 9.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T Alumni, Bandung, 2003, hlm. 4.

³ Pasal 38 ayat 1, Statuta Mahkamah Internasional, hukum kebiasaan Internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. kebiasaan internasional dapat dikatakan sebagai sumber hukum jika kebiasaan internasional tersebut bersifat umum, dan kebiasaan tersebut diterima oleh umum sebagai hukum.

negara pada negara lain, atau yang lebih dikenal dengan diplomasi⁴. Misi diplomasi ini menempatkan masing-masing perwakilan negara untuk mengatur dan mengurus persoalan negara secara keluar yang dipimpin oleh seorang duta besar.⁵ Kelebihan yang didapat oleh Negara sebagai subjek hukum internasional dibandingkan dengan subjek hukum internasional lainnya adalah Negara memiliki apa yang disebut dengan "kedaulatan". Kedaulatan yang artinya kekuasaan tertinggi, pada awalnya diartikan sebagai suatu kedaulatan dan keutuhan yang tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi serta tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan lainnya.⁶

Sehubungan dengan misi diplomasi yang terjamin perlindungannya oleh hukum internasional, terdapat kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak sah dilakukan karena bertentangan dengan hukum internasional terutama Konvensi Wina 1961, seperti halnya tindakan Amerika Serikat dalam mengakui Jerussalem sebagai ibukota Israel, dan mulai memindahkan dan membangun kantor kedutaan dari Tel Aviv ke Jerussalem, hal ini tidak

⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler : Teori dan Kasus*, P.T Alumni, Bandung, 1995, hlm. 2.

⁵ Pasal 2. Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik,

Pengangkatan seorang duta besar di suatu negara penerima oleh negara pengirim terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan (*agreement*) dari negara penerima, dalam hal negara penerima memberikan persetujuan terhadap seseorang yang disarankan untuk diangkat menjadi duta besar dari negara pengirim, seseorang dikatakan dapat diterima atau *persona grata*. Persetujuan itu secara resmi akan disampaikan sebelum pengangkatan orang tersebut diumumkan. Negara penerima yang telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain melalui suatu instrumen atas dasar asas timbal balik (*principle of reciprocity*) dan asas saling menyetujui (*principle of mutual consent*).

Negara-negara tersebut sudah harus memikirkan pembukaan suatu perwakilan diplomatik dan penyusunan keanggotaan perwakilan tersebut baik dalam tingkatannya maupun jumlah anggota staf perwakilan yang telah disetujui bersama atas dasar asas yang wajar dan pantas (*principle of reasonable and normal*).

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, **Pengantar Hukum Internasional**, P.T Alumni, Bandung, 2003, hlm 41.

sesuai dengan prinsip hukum internasional, karena Yerusalem merupakan ibu kota Negara palestina, yang dalam hal ini Israel banyak melakukan intervensi terhadap palestina sejak 2 dekade terakhir, tindakan Amerika Serikat ini lantas melahirkan banyak penolakan dan kecaman dari dunia internasional terutama dari timur tengah, karena Yerusalem merupakan kota suci yang merupakan kedaulatan dari Negara Palestina, bukan Israel.

Perserikatan Bangsa – Bangsa sudah mengeluarkan beberapa resolusi terkait konflik Palestina – Israel. Pertama adalah resolusi nomor 242 tahun 1967 yang menyatakan bahwa Israel diperintahkan untuk menarik pasukannya dari wilayah pendudukan yang dikuasai pada perang 1967. Ini termasuk bagian timur dari kota Yerusalem. Selanjutnya resolusi nomor 252 tahun 1968 yang menyatakan Israel diminta untuk menghentikan tindakan – tindakan yang terindikasi akan mengubah status Yerusalem. Ini termasuk tindakan mengambil alih lahan dan properti milik palestina. Resolusi 478 tahun 1980 menyatakan Israel dan/atau negara lain dilarang membuat undang – undang yang menyatakan perubahan status Yerusalem. Perubahan status dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Semua negara yang membuat perwakilan diplomatik di Yerusalem diminta agar menutupnya, dan masih banyak resolusi – resolusi terkait dengan konflik Israel dan Palestina lainnya.

Hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Implikasi Yuridis Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Jerusalem (Analisis Terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 tahun 1980).

Originalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti	Asal Instansi	Judul Penelitian	Keterangan
1.	Ridha Ayu Rachmawati	Universitas Brawijaya	Kekuatan Hukum Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa – Bangsa Nomor 2334 Tahun 2018 Tentang Penghentian Pemukiman di Wilayah Palestina Oleh Israel	Dalam penelitian ini mengkaji tentang resolusi DK PBB tentang penghentian pemukiman di wilayah palestina oleh Israel sedangkan penulis membahas tentang pemindahan kedutaan besar Amerika untuk Israel di Yerusalem.

Tabel 1 Originalitas Penelitian

B. Rumusan Masalah

- a. Apakah tindakan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem sudah sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 478 tahun 1980?
- b. Bagaimana Implikasi Yuridis Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Jerusalem (Analisis Terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 tahun 1980)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah tindakan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem sudah sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 478 tahun 1980?
2. Untuk menganalisis bagaimana Implikasi Yuridis Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di dalam bidang hukum internasional, khususnya pada kasus tindakan Amerika Serikat terhadap pemindahan kedutaan besar dari tel aviv ke Yerusalem.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat berguna dan dijadikan sebagai metode pembelajaran di dalam wacana pengetahuan mahasiswa maupun akademisi hukum yang hendak menyelesaikan tugas akhir
- b. Penelitian ini sebagai salah satu sumbangan pemikiran dari penulisan yang merupakan wujud aktualisasi peran mahasiswa dalam masyarakat
- c. Penelitian ini berguna untuk menambah keilmuan dan pengetahuan dalam bidang Hukum Internasional.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan dan memuat teori-teori yang dapat mendukung peneliti dalam melakukan pembahasan dan menjawab rumusan masalah. Dalam bab ini akan memuat: kajian umum tentang Hukum Internasional, hukum diplomatik internasional, dan pengertian Resolusi

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian dan data kepustakaan.

Adapun susunannya adalah sebagai berikut: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, dan teknik analisa data.

BAB IV : HASIL dan PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari semua rumusan masalah yang diangkat, yaitu: tentang Bagaimana Implikasi Yuridis Pemindahan

Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari Penulis berdasarkan penelitian dan saran dari penulis yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Internasional

1. Definisi Hukum Internasional

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah – kaidah perilaku yang terhadapnya Negara – negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar – benar ditaati secara umum dalam hubungan mereka satu sama lain dan yang meliputi juga ⁷:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi – organisasi internasional, hubungan – hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara – negara dan individu-individu; dan
- b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu – individu dan badan – badan non-negara sejauh hak – hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah – kaidah dan asas – asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas – batas negara antara:⁸

⁷ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 3

⁸ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasioanl*, Bina Cipta, 1978, hal. 3

- a. Negara dengan negara
- b. Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain .

Selain itu, banyak para sarjana yang membahas mengenai kedudukan hukum internasional sebagai bagian dari ilmu hukum. Beberapa berpendapat bahwa hukum internasional bukan bagian dari ilmu hukum tetapi hanya sebuah moral internasional yang secara positif tidak mengikat. Pendapat lain menyatakan bahwa hukum internasional merupakan hukum positif untuk menyelesaikan atau mengatur persoalan – persoalan dunia. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa hukum internasional adalah *world law* atau hukum dunia dengan jaringan, sistem dan mekanisme dari suatu pemerintahan dunia didalamnya.⁹ Cara pandang dalam melihat kedudukan hukum internasional berakibat pada perbedaan pendapat para sarjana. Hukum internasional selalu diidentikkan dengan pemerintahan dalam arti nasional dan selalu dipandang tidak mempunyai dasar serta selalu diperdebatkan, karena ketiadaan alat – alat atau sistem yang sama seperti negara.¹⁰

2. Istilah – Istilah Hukum Internasional

Beberapa istilah yang sering dipakai secara bergantian untuk pengertian hukum internasional sebagai berikut ¹¹:

- a. *Law of Nations*, terjemahan dari “droit de gens”

⁹A.Masyhur Effendi, *Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hal. 1

¹⁰*Ibid.* hal. 2

¹¹ Chairul Anwar, *Hukum Internasional : Pengantar Hukum Bangsa – Bangsa*, Djambatan, 1988, hal. 2

- b. *Transnational Law*, meliputi hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa yang melewati batas – batas negara.
- c. *Particular International Law*, yang menunjuk kepada perjanjian antar negara yang hanya mengikat beberapa negara saja.
- d. *General International Law*, yang menunjuk kepada traktat – traktat yang mengikat sebagian besar dari Negara-negara.
- e. *Public International Law*, istilah ini memberikan tekanan perbedaan antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional.

3. Sumber Hukum Internasional

a. Perjanjian Internasional

Dewasa ini, perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang terpenting. Dalam pelaksanaan hubungan internasional antarnegara perjanjian internasional menjadi instrumen yang utama. Peran dari perjanjian internasional ialah untuk meningkatkan kerja sama internasional, yang saat ini dapat dikatakan menggantikan hukum kebiasaan internasional. Hal ini dikarenakan sifatnya yang tertulis, sehingga memudahkan dalam hal pembuktian dibandingkan hukum kebiasaan yang sifatnya tidak tertulis sehingga cukup sulit untuk menemukan atau membuktikannya. Perjanjian internasional memiliki beberapa istilah seperti *convention*, *final act*, *declaration*, *memorandum of Understanding (MOU)*, *agreement*, *protocol*, *charter* dan lain sebagainya. Istilah-istilah ini hanya sebatas nama belaka dan tidak

berdampak yuridis.¹² Menurut Pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu atau lebih instrumen dan apa pun namanya. Maksud dibalik mensyaratkan pesertanya harus negara dan bentuknya tertulis adalah untuk memperkecil ruang lingkup semata. Konvensi Wina 1969 hanya bisa diterapkan terhadap sengketa mengenai perjanjian yang dibentuk negara dengan negara dan bentuknya harus tertulis. Untuk sengketa yang subjeknya bukan negara misalnya organisasi internasional pengaturannya ditemukan dalam Konvensi Wina 1986 tentang perjanjian internasional untuk sesama organisasi internasional atau organisasi dengan negara¹³. Syarat penting yang lainnya adalah bahwa perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional. Meskipun para pihaknya adalah negara, namun jika terdapat klausul bahwa para pihak tunduk pada hukum nasional salah satu peserta maka perjanjian tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional melainkan kontrak. Misalnya adalah Kontrak jual beli pesawat antara Indonesia dengan Malaysia yang menyebutkan apabila terjadi sengketa akan diselesaikan dengan hukum Indonesia.¹⁴

b. Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan internasional merupakan sumber hukum internasional yang tertua. Menurut Dixon hukum kebiasaan internasional

¹² Sefriani, S.H., M.hum., *Op. Cit.*, hlm.28

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 29

adalah hukum yang berkembang dari praktik negara-negara¹⁵. Hukum internasional tumbuh dan berkembang melalui kebiasaan negara-negara. Hingga saat ini, sebagian besar hukum internasional terdiri dari kaidah-kaidah kebiasaan. Kaidah-kaidah ini telah menjalani suatu proses sejarah yang panjang yang berujung pada pengakuan oleh masyarakat internasional.

Hukum kebiasaan internasional (*customary*) tidak sama dengan adat istiadat (*usage*) atau kesopanan internasional (*international community*) atau pun persahabatan (*friendship*). Penyambutan tamu negara, kalungan bunga dan jamuan makan malam bukanlah hukum internasional, melainkan kesopanan untuk mengahagai tamu asing. Sebaliknya pengibaran bendera putih sebagai tanda menyerah atau gencatan senjata merupakan hukum kebiasaan internasional. Begitu juga hal dalam pemberian imunitas pada negara asing di forum nasional.¹⁶

a) Unsur-Unsur Hukum Kebiasaan Internasional

1) Unsur Faktual

a. Unsur Praktik Negara-Negara

Unsur ini bersifat bisa bersifat aktif maupun pasif (*actual activity or mission*) pernyataan pimpinan negara terhadap suatu situasi, legislasi dalam hukum nasional, resolusi Majelis Umum PBB dan praktik organisasi internasional. Praktik negara juga bisa muncul dari putusan pengadilan nasional negara-negara.¹⁷

¹⁵ Martin Dixon, *Textbook on International Law : Fourth Edition*, Blackstone Press Limited, 2000, hlm.28

¹⁶ Sefriani, S.H., M.Hum, *Op. Cit.*, hlm. 41

¹⁷ Martin Dixon, *Op. Cit.*, hlm. 29

b. Unsur Praktik Umum

Unsur tidak mensyaratkan bahwa semua negara harus melakukan praktik tersebut. Tidak mungkin juga menetapkan secara pasti berapa syarat minimum jumlah negara yang mempraktikkannya. Bahkan hukum kebiasaan internasional tidak mensyaratkan persentase tertentu. Hal ini tergantung masalah apa yang diatur oleh hukum kebiasaan tersebut. Demikian juga hukum internasional tidak mensyaratkan bahwa hukum kebiasaan harus dipraktikkan di seluruh wilayah dunia. Hukum kebiasaan dipraktikkan oleh sedikit negara saja yang berkepentingan terhadap masalah yang menjadi objek hukum kebiasaan tersebut.¹⁸ Contohnya lebar laut territorial 12 mil yang semula hanya dilakukan oleh negara pantai. Konsep landas kontinen dan perlindungan kekayaan hayati laut awalnya hanya tumbuh di Amerika. Oleh karena itu, hukum kebiasaan dapat timbul di suatu wilayah dunia tertentu saja asalkan dipraktikkan secara luas oleh negara-negara di kemudian hari.¹⁹

c. Unsur Praktik yang Berulang-ulang

Unsur ini mensyaratkan kekonsistenan atau keseragaman dalam praktik. Unsur praktik yang seragam dan konsisten tidak juga mensyaratkan persetujuan terlebih dahulu dari negara-negara. Negara baru seperti Timor Leste yang lahir pada tahun

¹⁸ Sefriani, S.H., M.Hum, *Op. Cit.*, hlm. 43

¹⁹ Samin Zakaria, *Tinjauan Tentang Syarat-Syarat Dalam Proses Pembentukan Hukum Kebiasaan Internasional*, dalam jurnal hukum Projustitia, FH Parahyangan, Bandung, hlm. 1089

1999 terikat oleh berbagai hukum kebiasaan internasional meskipun Timor Leste tidak pernah menyatakan persetujuan pada hukum-hukum kebiasaan tersebut.²⁰ Menurut Akehurst keterikatan negara baru bukan karena persetujuannya, melainkan karena gagal untuk menyatakan keberatan akan aturan tersebut.²¹

d. Unsur Jangka Waktu

Mengenai berapa jangka waktu yang diberlakukan bagi praktik negara menjadi hukum kebiasaan internasional, ICJ tidak pernah memberikan petunjuk yang jelas. Dimungkinkannya adanya *instan custom*, meskipun itu jarang sekali terjadi²², tetapi itu tergantung oleh besarnya pengaruh negara yang mempraktekannya dan kepentingan masyarakat internasional terhadap lapangan yang menjadi objek dari pola tindakan tersebut²³. Misalnya, untuk menjadi hukum kebiasaan internasional hukum kebiasaan di ruang angkasa tidak memerlukan waktu yang lama.

2) Unsur Psikologis

Selain melihat praktik negara-negara, untuk menguji keberadaan suatu hukum kebiasaan perlu juga diketahui mengapa

²⁰ Sefriani, S.H., M.Hum, *Op. Cit.*, hlm. 43-44

²¹ Michael Akehurst, *A Modern Introduction to International Law*, 1983, George Allen
7 Unwin Publisher Ltd, UK, hlm. 32

²² Martin Dixon, *Op. Cit.*, hlm. 32

²³ Samin Zakaria. *Op. Cit.*, hlm. 1091

mereka mempraktikkan seperti itu.²⁴ Unsur faktual harus diikuti adanya keyakinan pada negara-negara tersebut bahwa apa yang mereka praktikkan merupakan suatu kewajiban dan harus dipatuhi dan bukan hanya sekedar *habitual*.²⁵ Lebih sulit untuk menentukan terpenuhinya unsur ini dibandingkan menganalisis unsur faktualnya. Hal ini dikarenakan unsur psikologis yang sifatnya abstrak dan subjektif. Selain itu, tidak ada kaidah dalam hukum internasional yang dipakai sebagai pedoman dalam menentukan ada tidaknya *opinion juris*. Berbagai pengadilan baik nasional maupun internasional merupakan yang paling berperan dalam menentukan ada tidaknya *opinion juris*.

c. Prinsip-prinsip Hukum Umum

Prinsip-prinsip hukum umum pertama kali diperkenalkan oleh Statuta PCIJ dan diakui oleh bangsa yang beradab dengan maksud apabila hakim dihadapkan pada suatu perkara terhindar dari masalah *non liquet*. Hakim tidak dapat menolak perkara yang dijatuhkan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya. Bila hakim tak mampu menemukan perjanjian maupun hukum kebiasaan yang relevan dengan kasus yang dihadapinya, hakim diarahkan untuk menggunakan prinsip hukum umum.

Prinsip hukum umum tidak hanya terbatas pada hukum internasional saja, tetapi dimungkinkan prinsip dalam hukum pidana,

²⁴ Michael Akehurst, *Op. Cit.*, hlm. 29

²⁵ Martin Dixon, *Op. Cit.*, hlm. 32

hukum perdata, hukum acara, hukum lingkungan dan lain-lain yang diterima dalam praktik negara-negara nasional. Beberapa prinsip tersebut antara lain prinsip *pacta sunt servanda*, prinsip *good faith*, prinsip *resjudicata*, *good governace*, *retroaktif*, *nullum delictum nulla poena legenal*, *nebis in idem*, *clean government* dan lain-lain.²⁶

Doktrin positivisme berpendapat bahwa hukum internasional semata-mata hanya merupakan kesepakatan negara-negara dan dimasukkannya prinsip hukum umum dalam Statuta sebagai sumber ketiga membuktikan adanya penolakan terhadap doktrin positivisme.²⁷

d. Putusan Pengadilan (Yurisprudensi)

Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan putusan pengadilan sebagai sumber hukum tambahan (*subsidiary*) bagi sumber – sumber hukum di atasnya. Meskipun begitu tidak berarti putusan pengadilan mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari sumber-sumber hukum di atasnya. Putusan pengadilan tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim dan hanya dapat digunakan untuk memperkuat sumber hukum di atasnya. Itulah mengapa putusan pengadilan dikatakan sebagai sumber hukum tambahan.²⁸

e. Doktrin

²⁶ Sefriani, S.H., M.Hum, *Op. Cit.*, hlm. 49

²⁷ Alina Kaczorowska, *Textbook : Public International Law*, Old Balley Press, London, 2002, hlm. 22

²⁸ Sefriani, S.H., M.Hum, *Op. Cit.*, hlm. 50

Doktrin atau karya hukum merupakan sumber hukum tambahan atau *subside*, sama halnya seperti putusan pengadilan. Doktrin juga bukanlah hukum yang mengikat. Doktrin tidak menciptakan hukum dan hanya merupakan opini, tidak mengikat dan bukanlah hukum. Hakim tidak dapat memutus perkara dengan dasar opini para pakar-pakar.

Meskipun bukan hukum dan tidak mengikat, tetapi dalam perkembangan hukum internasional banyak doktrin-doktrin yang cukup memiliki peran penting. Sebagai contoh pendapat dari Gidel tentang Zona Tambahan yang menjadi hukum kebiasaan internasional karena diikuti banyak pakar lainnya.²⁹

f. Resolusi

Seiring perkembangan kedinamisan hukum internasional melahirkan suatu tatanan sumber hukum baru yaitu resolusi atau keputusan suatu organisasi internasional yang menurut kebiasaan internasional diakui oleh negara-negara di dunia saat ini. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan dapat berasal dari organ eksekutif, legislatif maupun yudikatif suatu organisasi internasional.³⁰

Resolusi adalah suatu hasil keputusan dari suatu masalah yang telah disetujui melalui konsensus maupun pemungutan suara menurut aturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional atau badan yang bersangkutan. Resolusi pada umumnya terdiri dari dua

²⁹ Michael Akehurst, *Op. Cit.*, hlm. 37

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, Etty.R.Agoes, *Op.Cit.*, hal. 154.

bagian, yaitu paragraf yang bersifat mukadimah (preamble paragraph), dan paragraf yang bersifat operasional (operative paragraph).

Menurut *Black's Law Dictionary*, Keputusan (*decision*): “*a determination arrived at after consideration of facts, and in legal context law*”. Disebutkan bahwa keputusan itu adalah suatu ketentuan yang telah dicapai setelah mempertimbangkan fakta-fakta, dan dalam konteks hukum. Sedangkan *Resolution* “*a formal expression of the opinion or will of an official body or a public assembly, adopted by vote; as a legislative resolution*.”³¹

Istilah “resolusi” sebagaimana yang digunakan oleh PBB memiliki arti yang luas, yakni tidak hanya mencakup akan suatu rekomendasi melainkan juga keputusan. Hal ini berarti bahwa suatu resolusi merupakan suatu bentuk pernyataan yang resmi mengenai suatu pendapat atau kehendak dari suatu badan yang resmi atau suatu majelis yang bersifat umum serta disahkan melalui pemungutan suara serta dinyatakan bahwa suatu resolusi itu merupakan sebagai suatu bentuk penyelesaian secara legislatif.³² Pada umumnya resolusi merupakan suatu pernyataan tercatat yang berisi kesepakatan oleh negara-negara anggota.³³ Secara umum, organisasi internasional merupakan suatu bentuk kerjasama atau koordinasi antar negara dalam suatu wadah yang telah mereka sepakati.³⁴ Kesepakatan – kesepakatan antar negara tersebut mereka

³¹ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*. hal. 457

³² Marko Divac Oberg, *The Legal Effect of Resolution of The UN Security Council and General Assembly in The Jurisprudence of The ICJ*, 16 *Eur.J.Int'l.L.* 2006. hal. 879

³³ Richard K. Gardiner, *International Law*, (England : Pearson Education Limited, 2003), hal. 254.

³⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm. 465

tuangkan dalam bentuk suatu perjanjian yang mengikat antar negara tersebut. Keputusan-keputusan atau resolusi yang dilahirkan oleh suatu organisasi internasional ada yang mengikat pada ruang lingkup intern organisasinya saja. Namun ada juga organisasi interanasional yang mana keputusan yang dikeluarkannya tidak hanya berlaku dan mengikat bagi negara – negara anggotanya saja melainkan juga mengikat bagi negara-negara non-anggota. Oleh karena itu pengaruh dan ruang lingkup berlakunya keputusan tersebut sangat besar dan luas. Hal ini dapat dilihat pada keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Umum maupun Dewan Keamanan PBB dimana ruang lingkup resolusi yang dikeluarkannya juga berlaku bagi negara non anggota PBB.³⁵ Dalam praktiknya, adapun fungsi-fungsi suatu resolusi yang dikeluarkan oleh suatu organisasi internasional adalah:³⁶

*“menciptakan kewajiban, hak dan tau kekuatan mapupun wewenang (fungsi substantif)
menentukan fakta atau keadaan hukum yang dapat menentukan fungsi substantif tersebut
Menentukan bagaimana dan kapan suatu fungsi substantif tersebut dapat berlaku.”*

a) Resolusi Majelis Umum PBB

Dari keseluruhan badan terpenting PBB, Majelis Umum merupakan badan PBB yang berfungsi sebagai badan paripurna secara menyeluruh. Wewenang badan ini bersifat umum, dan bukan bersifat khusus. Dilihat dari susunan internal organisasinya, Majelis Umum merupakan inti daripada organisasi dan melaksanakan fungsi-fungsi

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Marko Divac Oberg, Op.Cit, hal. 881

yang saling berbeda dalam kaitannya dengan badan PBB lainnya dan tentu saja juga dalam kaitannya dengan aturan, prosedur dan metode serta prosedur operasinya sendiri.³⁷

Dalam hal susunan eksternalnya, organ ini merupakan fungsi-fungsinya dalam bidang politik, social, ekonomi, kemanusiaan dan kebudayaan. Badan ini merupakan konferensi diplomatik bagi seluruh anggota PBB. Badan ini berhak meminta pendapat serta nasihat dari Mahkamah Internasional dan memberi kuasa kepada badan-badan lainnya untuk melakukan hal yang serupa. Namun Majelis Umum bukanlah badan pembuat undang-undang layaknya badan paripurna suatu negara. Organ ini tidak menghasilkan undang-undang, melainkan menghasilkan suatu keputusan bersama yang disebut resolusi. Majelis Umum juga bukanlah sebuah parlemen, karena Majelis Umum tidak memiliki kekuasaan untuk menggeser Dewan Keamanan dari kedudukannya.³⁸

Dipandang dari perspektif historis yang luas, ketentuan-ketentuan Piagam PBB mengenai Majelis Umum, melambangkan formulasi cara-cara yang telah dibentuk oleh pendahulunya, yaitu Majelis Umum Liga Bangsa-Bangsa.³⁹ Majelis Umum terdiri dari seluruh anggota PBB. Beberapa negara bukan anggota yang mempunyai wakil yang mereka tunjuk di PBB menghadiri sidang-sidang Majelis Umum hanya sebagai tamu saja. Majelis Umum

³⁷ J.G.Starke, *Pengantar hukum Internasional. Edisi ke-10, Jilid II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 836

³⁸ James Barros, *United Nation, Past, Present and Future*, diterjemahkan oleh D.H.Gulo, *PBB, Dulu, kini dan Esok, Edisi Pertama*, Bumi Aksara, Jakarta, 1984. hal 64.

³⁹ Ibid, hal. 65

biasanya mengadakan sidang tetap sekali setahun, dimulai pada hari Selasa ketiga pada bulan September. Majelis Umum biasanya mengadakan sidangnya di markas PBB di New York, kecuali mayoritas anggota menyetujui tempat lain 120 hari sebelum persidangan Majelis Umum mengeluarkan garis-garisprosedurnya.⁴⁰

Tidak satupun negara anggota yang boleh mengirim lebih dari lima orang wakilnya dalam sidang-sidang Majelis Umum. Ketetapan ini dikeluarkan dalam Konferensi San Fransisco (25April – 26 Juni 1945) dengan maksud melindungi kepentingan-kepentingan negara-negara anggota yang lebih kecil. Namun berdasarkan prosedur Majelis Umum, negara-negara anggota dapat mengirim lima wakil yang bergantian pada sidang-sidangnya. Tiap-tiap delegasi tersebut dapat memiliki sejumlah penasihat dalam stafnya untuk membantu pekerjaan dan meliputi berbagai komite Majelis Umum. Mandat dari wakil-wakil pemerintah ini harus dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal oleh Kepala Negara atau Pemerintah atau Menteri Luar Negeri, tidak kurang dari satu minggu sebelum tanggal pembukuan sidang. Majelis Umum beroperasi melalui:⁴¹

- 1) Sidang-sidang paripurna;
- 2) Tujuh komite utama;
- 3) Dua komite organisasi; dan
- 4) Komite-komite ad hoc tak berkala (*occansional*) yang dibentuk untuk memperlancarpekerjaan sidang.

⁴⁰ Ade Maman Suherman, Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 116.

⁴¹ James Barros, Op.Cit., hal.70-71.

Pemilihan ketua Majelis Umum PBB bersifat rahasia dan tanpa penunjukan calon. Larangan ini memperkecil adanya pidato-pidato pencalonan dan protes pencalonan ini mengambil tempat di belakang panggung sampai pada pemilihan selesai. Dengan meningkatnya jumlah anggota PBB, Majelis Umum memutuskan untuk memilih 17 orang wakil ketua dan memilih mereka berdasarkan kepastian sifat representatif dari *General Committee*, yaitu: 7 dari negara-negara Asia Afrika, 3 dari negara-negara Amerika Latin, 2 dari negara – negara Eropa Barat dan negara-negara lainnya, dan 1 dari negara Eropa Timur.

Bersama dengan ketua Majelis dan ketua ketujuh Komite Utama serta Wakil Ketua Majelis membentuk *General Committee* yang mengorganisasikan pekerjaan Majelis Umum diseluruh persidangannya. *General Committee* menganjurkan kepada Majelis pencakupan, pengeluaran dan penanggungan pokok – pokok dalam agenda; penyusunan kembali kata-kata dan pengelompokan atau penggabungan pokok – pokok acara tersebut kepada sidang Majelis Paripurna itu sendiri atau kepada komite-komite utama dan tanggal penutupan sidang. Majelis Umum juga menunjuk anggota-anggota *Credential Committee* berdasarkan usul ketua sidang sementara. Untuk mempersiapkan hal-hal untuk dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Umum untuk implementasi resolusinya, Majelis Umum berhak membentuk berbagai badan subsider⁴²

⁴² James Barros , Ibid.

b) Resolusi Dewan Keamanan PBB

Menurut Pasal 23 Piagam PBB yang telah diamandemen, Dewan Keamanan PBB terdiri atas 15 negara anggota. Dari 15 negara anggota ini, 5 negara diantaranya merupakan Negara yang merupakan anggota tetap dan 10 negara lainnya merupakan Negara yang merupakan anggota tidak tetap. Yang merupakan Negara anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB adalah Amerika Serikat, Rusia, Perancis, China, dan Inggris. Sebagai Negara yang merupakan Negara anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB, kelima Negara ini memiliki beberapa hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh Negara-negara lain yang merupakan Negara anggota tidak tetap. Kelima anggota tetap ini memiliki status luar biasa (eksepsional) tidak hanya berdasarkan atas kepermanennannya saja akan tetapi juga oleh alasan-alasan hak-hak suara khusus terutama hak “*veto*”. Alasan sah bagi pemberian status luar biasa untuk kelima anggota tetap ini terletak dalam “*inescapable fact of power differential*”. Dengan perkataan lain, dasar pemikiran yang melandasinya yaitu bahwa negara-negara inilah yang dibebankan tanggung jawab terberat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan oleh karena itu kepada mereka harus diberikan hak suara final dan menentukan dalam memutuskan tentang bagaimana tanggung jawab itu harus dilaksanakan.⁴³

⁴³ James Barros, Op.Cit., hal. 8.

Sifat dan keputusan atau resolusi yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB adalah sangat berbeda dengan resolusi yang dikeluarkan oleh badan utama lainnya seperti Majelis Umum PBB, Dewan Perwalian, dan Dewan *ECOSOC*. Keputusan-keputusan dari ketiga badan utama tersebut mempunyai dua sifat, yakni bersifat hanya mengikat secara internal dan rekomendatif.⁴⁴ Sedangkan keputusan Dewan Keamanan benar-benar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bahkan dapat bertentangan dengan prinsip hukum internasional, yang mana kekuatan mengikat resolusi Dewan Keamanan tidak hanya mengikat bagi negara yang merupakan anggota PBB melainkan juga mengikat bagi negara – negara yang bukan anggota PBB.

B. Hukum Diplomatik Internasional

1. Sejarah Perkembangan Hukum Diplomatik

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak mempunyai dampak terhadap hubungan antar Negara dan perkembangan anggota masyarakat internasional, dengan laju pertumbuhan Negara-negara yang baru merdeka, maka dirasakan adanya tantangan untuk mengembangkan lagi kodifikasi hukum diplomatik secara luas. Pengembangan itu tidak saja ditujukan untuk memperbaharui, tetapi juga dalam rangka melengkapi prinsip-prinsip dan

⁴⁴ James Barros, Op.Cit, hal.102.

ketentuan hukum diplomatik yang ada.⁴⁵ Sejarah telah membuktikan bahwa, jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktek hubungan diplomatik, di zaman india kuno telah dikenal ketentuan-ketentuan atau kaedah – kaedah yang mengatur hubungan antara raja ataupun kerajaan, dimana hukum bangsa-bangsa pada waktu itu telah mengenal pula apa yang dinamakan duta.⁴⁶

Pengiriman duta Negara Asia serta Arab sejak sebelum Negara-negara barat mengetahuinya. Di benua eropa baru ada pada abad ke 16 masalah pengiriman dan penempatan duta-duta itu diatur menurut hukum kebiasaan. Tetapi hukum kebiasaan internasional mengenai soal ini baru menjadi jelas pada abad ke 19, dimana pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik mulai dibicarakan pada kongres wina tahun 1815 yang diubah oleh protocol “Aix La-Chapelle” 1818. Kongres Wina tersebut pada hakekatnya telah merupakan tonggak sejarah diplomasi modern, karena telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistematis termasuk praktek-praktek cara-cara secara umum di bidang diplomasi.⁴⁷

Usaha-usaha untuk mengadakan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomasi selanjutnya yang dipandang cukup berarti adalah dalam tahun 1927 pada masa Liga Bangsa-Bangsa. Sesuai dengan resolusi Dewan Liga Bangsa – Bangsa telah dibentuk komite ahli untuk membahas perkembangan kodifikasi hukum internasional, dimana telah dilaporkan

⁴⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler : Teori dan Kasus*, P.T Alumni, Bandung, 1995, hlm. 2

⁴⁶ Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, 1971, hlm. 165.

⁴⁷ Ibid, hlm 166

bahwa dalam subyek hukum diplomatik yang meliputi cabang-cabang dari pergaulan diplomatik antar Negara haruslah diatur secara internasional. Dewan Liga Bangsa-Bangsa tidak menerima rekomendasi komite ahli tersebut dan karena itu memutuskan untuk tidak memasukkan masalah yang sama dalam agenda konferensi konfrensi den haag yang diadakan dalam tahun 1930 untuk kodifikasi hukum internasional.⁴⁸

Sementara itu konferensi Negara-Negara Amerika yang diadakan di Havana tahun 1928 tidak saja telah menganggap bahwa masalah itu sangat penting, tetapi juga setelah dengan panjang lebar membahasnya telah menetapkan dua konvensi satu mengenai pejabat diplomatik dan yang lainnya mengenai pejabat konsuler. Dua konvensi itu telah diratifikasi oleh dua belas Negara Amerika, tetapi Amerika Serikat cenderung untuk tidak meratifikasinya dengan alasan bahwa dicantumkannya ketentuan mengenai suaka diplomatik, dianggap tidak tepat dan dapat menimbulkan keberatan. Namun konvensi Havana itu kemudian tidak saja dapat merintis tetapi juga lebih dari itu telah berhasil untuk pertama kalinya dalam usaha mengadakan kodifikasi hukum diplomatik. Setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan dalam tahun 1945, dua tahun kemudian telah dibentuk Komisi Hukum Internasional.⁴⁹ Selama tiga puluh tahun (1949-1979) komisi telah

⁴⁸ Sam Suhaidi, *A Concise Hlstory of the Law of Nations*, Bandung, 1969.hlm. 5.

⁴⁹ Ibid, hlm. 7

menangani dua puluh tujuh topik hukum internasional, tujuh diantaranya adalah menyangkut hukum diplomatik yaitu:⁵⁰

- a) Pergaulan dan kekebalan diplomatik
- b) Pergaulan dan kekebalan konsuler
- c) Misi-misi khusus
- d) Hubungan antar negara dan Organisasi Internasional (Bagian I)
- e) Masalah perlindungan dan tidak diganggu-gugatnya para pejabat Diplomatik dan orang-orang lainnya yang berhak memperoleh perlindungan khusus menurut hukum internasional
- f) Status kurir diplomatik dan kantong diplomatik yang tidak diikutsertakan pada kurir diplomatik
- g) Hubungan antar negara dengan Organisasi Internasional (Bagian II)

Pengaturan hukum diplomatik dan perwakilan diplomatik sudah lama diadakan, yaitu sejak kongres wina tahun 1815, yang diubah oleh protokol "Aix-La-Chapelle" tahun 1818. Kemudian atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa diadakan konferensi mengenai hubungan diplomatik di wina, dari tanggal 2 Maret -14 April 1961. Konferensi tersebut membahas rancangan pasal-pasal yang telah dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menerima baik suatu konvensi mengenai hubungan diplomatik, yang terdiri dari 53 pasal yang mengatur hubungan diplomatik secara menyeluruh baik mengenai kekebalan maupun keistimewaan diplomatik. Konvensi yang mencerminkan pelaksanaan hubungan diplomatik ini akan dapat

⁵⁰ Pasal 13 (ayat 1) Piagam PBB, antara lain Majelis umum diminta untuk memprakarsai studi-studi dan memberikan rekomendasi dalam rangka mendorong perkembangan Hukum Internasional beserta kodifikasi.

meningkatkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa di dunia tanpa membeda-bedakan ideologi, sistem politik, atau sistem sosialnya. Konvensi telah menetapkan antara lain maksud pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik tersebut tidaklah untuk kepentingan perseorangan, melainkan guna menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik sebagai wakil Negara. Pada tanggal 8 desember 1969, Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa menerima baik konvensi mengenai misi khusus dan suatu protokol opsional mengenai penyelesaian sengketa secara wajib. Konvensi mengenai misi khusus terbuka bagi penandatanganan pada tanggal 16 Desember 1969. Konvensi yang terdiri dari suatu pembukaan dan 55 pasal menentukan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk mengirim dan menerima misi khusus, yaitu misi ke Negara lain dengan persetujuan Negara tersebut, dengan tujuan menangani masalah – masalah khusus atau menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas tertentu.

2. Asas dalam Hukum Diplomatik

Pengertian asas adalah kebenaran dasar yang dapat member arah pada penyusunan kaidah-kaidah hukum yang lebih konkret sehingga sehingga seluruh kaidah yang terdapat pada suatu bidang hukum menjadi kesatuan yang tetap utuh.⁵¹ Asas hukum harus dapat dipakai sebagai sumber sekaligus asal yang mengandung kebenaran dasar. Suatu saat hukum diharapkan dapat member arah pada penyusunan kaidah hukum yang lebih konkret sehingga kaidah tersebut merupakan jabaran dan asas

⁵¹ Sunaryati Hartono. *Politik Hukum menuju satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 6.

hukum, sehingga terjadi konsistensi dan mudah di implementasikan. Suatu asas hukum harus dapat dipakai sebagai sarana rujukan apabila suatu saat terjadi perselisihan dalam penafsiran kaidah hukum. Menurut Masyur Effendi, setidaknya ada 7 asas hukum diplomatik, yaitu sebagai berikut :⁵²

- a) Asas persamaan, persaudaraan, dan perdamaian. Tersirat dalam pembukaan Konvensi Wina tahun 1961
- b) Asas penghormatan atas perbedaan antarnegara. Hal ini tersirat dalam naskah Pembukaan Konvensi Wina 1961 Alenia II
- c) Asas penghormatan atas wakil-wakil Negara dengan titik berat pada penghormatan pada kedaulatan Negara masing-masing, hal ini tersirat dalam naskah Pembukaan Konvensi Wina 1961 alinea IV
- d) Asas penghormatan atas dasar adat dan kebiasaan internasional, hal ini di tegaskan dalam naskah Pembukaan Konvensi Wina 1963 alinea V
- e) Asas kehendak bersama, asas ini ditegaskan dalam pasal 2 Konvensi Wina 1963
- f) Asas tidak dapat diganggu gugatnya perwakilan dari masing-masing Negara, hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 22 ayat 1 Konvensi Wina Tahun 1961
- g) Asas kepercayaan, ini diatur dalam pasal 26 Konvensi Wina 1961

Asas hukum diplomatik tersebut berpangkal pada asas hukum romawi, misalnya asas itikad baik (*bonafides*), timbal balik (*resiprositas*), persetujuan antar bangsa harus ditaati (*pacta sunt*

⁵² Masyur Effendi, *Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif Asas hukum Diplomatik dalam era ketergantungan antar Bangsa*. Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hlm.133

servanda), selalu berdasar pada prinsip keadilan (*et alquo et bono*), persetujuan timbal balik (*mutual consent*), hak-hak istimewa (*privailegium*), kekebalan hukum (immunitet). Prinsip yang pernah digunakan oleh Mahkamah Internasional antara lain *good faith*, *estoppels*, *res judicatta*, *circumstantial evidence*, *equity*, *pacta sunt servanda*, dan *effectivities*.

3. Sumber Hukum Diplomatik

Berpijak pada pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum materiel dari hukum internasional sebagai berikut:⁵³

- a) Perjanjian Internasional secara tegas memuat ketentuan yang diakui oleh negara-negara bersengketa. Salah satunya *Vienna Convention on Diplomatic Relation and Optional Protocol* 1961 yang memuat *Vienna Convention Diplomatic Relations, Optional Protocol Concerning acquisition of Nationality, Optional Protocol Concerning The Compulsary Settlement*.
- b) Kebiasaan-kebiasaan internasional praktik umum yang diakui sebagai hukum yang dapat dijadikan kebiasaan internasional jika suatu kebiasaan bersifat umum dan kebiasaan tersebut harus diterima sebagai hukum.
- c) Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab. Diantaranya kesepakatan bersama, prinsip timbal balik, prinsip komunikasi bebas, prinsip tidak di ganggu gugat, prinsip layak dan umum, prinsip eksteritorial.

⁵³ Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38

- d) Putusan-putusan pengadilan dan ajaran-ajaran ahli hukum terkemuka dari berbagai negara di dunia. Putusan pengadilan mengikat pada pihak yang diwajibkan melaksanakan keputusan tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang berarti penelitian hukum ini dilakukan dengan meneliti bahan hukum. Peneliti akan mengkaji aturan-aturan hukum dalam hukum internasional menggunakan teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Hukum Tertulis (*statute approach*)

Karena pendekatan ini dilakukan dengan menelaah hukum tertulis dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang **ditangani**.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus hukum langsung karena masih berlangsung dari awal hingga berakhirnya proses kasus ini⁵⁴

C. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenia bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. BahanHukum Primer:

a. *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*

b. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 478

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian**, Cetakan I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, Hlm. 40-41

2. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum, notulensi pembahasan perjanjian atau konvensi internasional, dan pendapat para ahli.
3. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia dan kamus.

D. Teknik Penulisan Bahan Hukum

Penelitian ini melakukan penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan studi kepustakaan maupun bahan hukum lainnya. Sumber data diperoleh dari data sekunder seperti konvensi atau perjanjian internasional, jurnal hukum, hasil penelitian, buku-buku, tesis, dan lain-lain. Dimana semua itu penulis telusuri pada:

1. Perpustakaan.
2. Buku-buku, literatur, dan jurnal hukum.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dengan menguraikan bahan hukum yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka tetapi berdasarkan pada konvensi/perjanjian internasional, literatur hukum, hasil penelitian dan lain-lain.

F. Definisi Konseptual

1. Hukum Internasional

Hukum Internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang dipatuhi oleh Negara-negara dan badan-badan internasional sebagai kewajiban yang mengikat dalam hubungan satu sama lain dalam pergaulan internasional.

2. Implikasi Yuridis

Implikasi Yuridis adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari suatu kejadian hukum.

3. Kedutaan Besar

Kedutaan besar adalah kantor atau tempat bekerjanya perwakilan diplomatik suatu negara atau Lembaga/organisasi internasional yang ditempatkan di negara lain yang dipimpin oleh duta besar.

4. Resolusi Dewan Keamanan PBB

Resolusi dewan keamanan PBB adalah Resolusi adalah suatu hasil keputusan dari suatu masalah yang telah disetujui melalui konsensus maupun pemungutan suara menurut aturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh dewan keamanan PBB.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Apakah Tindakan Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat Dari Tel Aviv Ke Yerusalem Sesuai Dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 Tahun 1980

1. Konflik Palestina dan Israel

Israel dan Palestina adalah dua negara yang tidak asing lagi di telinga masyarakat Internasional. Konflik yang berkepanjangan menyebabkan kedua negara tersebut menjadi salah satu obyek yang tidak luput dari perhatian dunia. Israel dan palestina merupakan salah satu Kawasan yang terletak di wilayah Timur-Tengah yang merupakan sebuah Kawasan geopolitik yang menjadi wilayah konflik berkepanjangan. Wilayahnya yang mengandung sumber daya mineral dalam jumlah yang banyak, telah menjadikan Kawasan ini sebagai ajang untuk kekuatan negara – negara besar yang memiliki kepentingan akan energi⁵⁵. Tidak hanya itu, Kawasan timur tengah merupakan kawasan berasalnya tiga agama samawi, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi yang sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai tanah suci bagi ketiga agama. Fakta ini pula yang melatar belakangi terjadinya perang salib dalam kurun waktu ratusan tahun.

Ottomanlah yang paling lama menguasai Palestina yakni selama hampir 750 tahun dari tahun 1187 hingga 1918. Dan selama dalam

⁵⁵ Anup Shah, “The Middle East”, diakses pada tanggal 27 Maret 2011, URL: <http://www.globalissues.org/Geopolitics/MiddleEast.asp,html>.

penguasaan Ottoman bangsa yang paling dominan saat itu adalah bangsa Arab yang mayoritas beragama Islam⁵⁶.

Pada abad ke-19, Ottoman mulai melakukan kerjasama dengan bangsa Eropa untuk meningkatkan perekonomiannya. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Yahudi di Eropa untuk kembali ke Palestina. Melalui suatu gerakan yang mereka sebut Gerakan Zionisme, warga Yahudi melakukan pendudukan kembali wilayah Palestina dengan membeli tanah-tanah kosong. Yahudi menyadari bahwa tanah di Palestina sangat penting untuk mereka miliki bagi masa depan Negara Israel yang ingin mereka dirikan. Untuk itu Yahudi mendirikan *Jewish National Fund* pada tahun 1901 untuk mengkoordinasikan dan memusatkan informasi pembelian tanah bagi orang-orang Yahudi dan memastikan bahwa tanah yang telah mereka beli tidak akan pernah dijual kembali.⁵⁷

Pembelian tanah yang dilakukan oleh Yahudi ini berhasil terhindar dari kecurigaan pemerintah Ottoman dengan menyatakan bahwa ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan pajak pendapatan dan untuk memodernisasi populasi yang berpencar dengan mendirikan permukiman-permukiman. Diantara tahun 1895 hingga 1914, empat puluh ribu Yahudi telah berhasil memasuki Palestina dan seringkali bukan untuk alasan agama melainkan berkoloni dan mendirikan basis/pangkalan untuk menguasai kembali Palestina sebagai Israel.⁵⁸ Meskipun Yahudi berhasil meyakinkan pemerintah Ottoman, namun tidak dengan bangsa Arab Palestina. Bangsa

⁵⁶ Charles D. Smith, *Palestine and the Arab-Israeli Conflict*, United States of America: Bedford/St. Martin's, 2001, h. 2-9.

⁵⁷ Ibid., h. 124

⁵⁸ Ibid., h. 2-34.

Arab Palestina percaya bahwa kedatangan dan pemukiman Yahudi yang semakin bertambah suatu saat nanti akan menjadi ancaman bagi bangsa Arab di Palestina.

Menjelang Perang Dunia I, Turki menyatakan diri akan beraliansi dengan Jerman. Inggris yang khawatir akan kekuatan aliansi ini memutuskan untuk meminta bantuan Yahudi. Inggris percaya bahwa dukungan yang diberikan oleh Zionis akan membawa Yahudi Amerika untuk mendorong Presiden Woodrow Wilson agar mengeluarkan keputusan beraliansi dengan Inggris. Sebagai gantinya Inggris membentuk Deklarasi Balfour pada tanggal 2 November 1917 yang menjanjikan kampung halaman untuk Yahudi di Palestina, bukan kedaulatan Yahudi atas seluruh tanah Palestina maupun Negara Palestina. Tapi Zionis tetap menganggap bahwa pembentukan deklarasi ini merupakan suatu awal yang baik untuk pengakuan Negara Israel di Palestina.⁵⁹ Setelah kemenangan pihak Inggris pada Perang Dunia I, LBB menentukan suatu Sistem Mandat untuk daerah-daerah yang berada pada teritorial Jerman dan Ottoman. Sistem itu mengatur bahwa daerah-daerah tersebut akan dikusai sementara oleh negara-negara pemenang perang. Untuk Palestina, sistem mandatnya diberikan kepada Inggris dan Inggris kemudian menepati janjinya terhadap Yahudi untuk menjadikan Palestina sebagai kampung halaman Yahudi. Walaupun pada saat itu bangsa Arab Palestina meminta hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, Inggris menolaknya atas dasar pertimbangan ingin menjalankan ketetapan yang sudah diatur di dalam

⁵⁹ Jerome Slater, *What Went Wrong? The Collapse of the Israeli-Palestinian Peace Process*, *Political Science Quarterly*, 116:2 (Summer, 2001), h. 173.

Deklarasi Balfour.⁶⁰ Bangsa Arab Palestina menolak mentah – mentah keputusan Inggris ini dan situasi Palestina pun semakin memanas lalu memicu pemberontakan – pemberontakan yang ditujukan kepada Yahudi dan memicu terjadinya krisis di Palestina. Krisis yang terjadi diantara kedua bangsa ini nyatanya tidak dapat diatasi oleh Inggris sebagai pemegang mandate atas Palestina semenjak berakhirnya Perang Dunia I. setelah berakhirnya Perang Dunia II dan terbentuknya Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), Inggris akhirnya secara resmi menyatakan mundur dan menyerahkan mandat Palestina kepada PBB.

Pada tanggal 14 Mei 1948 mereka mendeklarasikan negara Israel dengan wilayah teritorialnya adalah wilayah yang ditentukan oleh *UN Partition Plan*.⁶¹ Pada tanggal 15 Mei 1948 Amerika Serikat mengakui negara Israel secara de facto dan diikuti oleh Uni Soviet yang mengakui kedaulatan negara Israel secara de jure. Di hari yang sama pula, pasukan dari negara-negara Arab menginvasi Palestina untuk menyerang negara Israel, memulai babak baru peperangan di Timur Tengah.⁶²

Peperangan terjadi hingga tahun 1967 dan pada tahun itu disebut sebagai Perang Enam Hari (*The Six-Day War*). Perang ini terjadi di Semenanjung Sinai yang dipicu oleh dukungan Syria terhadap infiltrasi yang dilakukan oleh Fatah terhadap Israel. Israel yang merasa terancam atas dukungan Syria ini akhirnya melakukan serangan balasan ke Syria.

Walaupun telah mendapatkan bantuan dari Mesir, Syria tidak dapan

⁶⁰ Charles D. Smith, op.cit., h. 81-83.

⁶¹ Fred Halliday, *The Middle East in International Relations, United States of America*: Cambridge University Press, 2005, h. 111.

⁶² Charles D. Smith, op.cit., h. 200-201.

mengatasi perlawanan yang dilancarkan oleh Israel.⁶³ Melalui serangannya, Israel berhasil menduduki Semenanjung Sinai, Tepi Barat, Jalur Gaza, serta Dataran Tinggi Golan. Untuk mengakhiri perang ini, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No. 242 yang berisikan penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah – wilayah yang berhasil didudukinya, serta menghendaki penghormatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan setiap negara yang berada di Timur Tengah serta menghormati hak negara – negara tersebut untuk hidup dalam damai.⁶⁴ Namun pada kenyataannya, keempat wilayah ini tetap menjadi jajahan Israel hingga dicapainya kesepakatan *Camp David* pada tahun 1979.

Selama rentang waktu antara tahun 1979 hingga kini sudah banyak resolusi PBB yang dikeluarkan oleh Majelis Umum maupun Dewan Keamanan PBB terkait konflik Palestina dan Israel. Salah satunya adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 478 tahun 1980 yang menyatakan bahwa setiap negara dilarang untuk membuka perwakilan diplomatiknya di Yerusalem yang masih menjadi kota suci bagi 3 agama dan dunia internasional.

Pengakuan Israel sebagai negara ini banyak di dukung oleh Negara-negara barat yang salah satunya adalah Amerika Serikat. Salah satu langkah yang diambil Amerika Serikat dalam mendukung pengakuan negara Israel ini adalah dengan dibentuknya Undang – Undang Kedutaan Besar Yerusalem 1995 (*Jerusalem Embassy Act of 1995*) yang mana ini disahkan oleh Kongres ke-104 pada tanggal 23 Oktober 1995. UU ini disahkan

⁶³ Ibid., h. 281-286

⁶⁴ Avi Shlaim, *The Oslo Accord*, *Journal of Palesine Studies*, 23:3 (Spring, 1994), h. 25.

sebagai dasar hukum dimulainya proses dan alokasi dana pemindahan Kedutaan Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, selambat-lambatnya 31 Mei 1999. UU ini menahan 50 persen dana yang dialokasikan ke Kementerian Luar Negeri untuk pos "Pengadaan dan Pengelolaan Bangunan di Luar Negeri" pada tahun anggaran 1999 sampai Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem resmi dibuka.⁶⁵

Namun walaupun sudah sah, Undang-Undang ini tidak dilaksanakan oleh Presiden Amerika Serikat dari Bill Clinton, Bush, dan yang terakhir adalah Obama. Karena mereka memandang Undang – Undang ini sebagai bentuk campur tangan Kongres terhadap kewenangan kebijakan luar negeri Presiden yang sudah di mandatkan Konstitusi. Dengan mengeluarkan Ketetapan Presiden (Tappres) untuk menunda pelaksanaan Undang-Undang ini atas dasar keamanan nasional. Akhirnya Presiden Donald Trump pada Juni 2017 mengeluarkan Tappres untuk menjalankan Undang-Undang ini lalu pada tanggal 6 Desember 2017 ia mengakui bahwa Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memulai proses pemindahan kedutaan besar.

Keputusan Trump ini bertentangan dengan kebijakan luar negeri AS selama tujuh dekade terakhir terkait status Yerusalem. Ini juga bertentangan dengan sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB, yang didukung 15 anggota. Berikut ini sejumlah resolusi DK PBB menyangkut status Yerusalem yang dibuat selama 50 tahun terakhir, dan didukung AS:⁶⁶

⁶⁵ Breger, Marshall J, *Jerusalem: A City and Its Future*, Ora Ahimeir Syracuse University Press, 2002, hlm. 433

⁶⁶ 9 Resolusi Dewan Keamanan PBB Menyangkut Yerusalem, <http://kabar24.bisnis.com/read/20171208/19/716466/9-resolusi-dewan-keamanan-pbb-menyangkut-status-Yerusalem> diakses pada tanggal 5 Agustus 2018

a. Resolusi 242 (22 Nopember 1967)

Israel diperintahkan untuk menarik pasukannya dari wilayah pendudukan yang dikuasai pada perang 1967. Ini termasuk bagian timur dari Kota Yerusalem.

b. Resolusi 252 (21 Mei 1968)\

Israel diminta untuk menghentikan tindakan-tindakan yang terindikasi akan mengubah status Yerusalem. Ini termasuk tindakan mengambil alih lahan dan properti milik Palestina.

c. Resolusi 465 (1 Maret 1980)

Israel diperingatkan agar menghentikan pembangunan pemukiman dan membongkar semua pemukiman di daerah pendudukan, yang dikuasai pada perang 1967, termasuk Yerusalem. Resolusi PBB menilai tindakan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap Konvensi Jenewa mengenai perlindungan warga sipil selama masa perang.

d. Resolusi 478 (20 Agustus 1980)

Israel dilarang membuat undang-undang yang menyatakan perubahan status Yerusalem. Perubahan status itu dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Semua negara yang membuat perwakilan diplomatik di Yerusalem diminta agar menutupnya.

e. Resolusi 672 (12 Oktober 1990)

Israel disebut sebagai kekuatan pendudukan selama masa Intifada pertama (perlawanan Palestina) di Yerusalem. Israel dikecam karena

tewasnya 20 warga Palestina dalam tindak kekerasan di tempat suci di kota ini pada 8 Oktober.

f. Resolusi 1073 (28 September 1996)

Israel diperingatkan soal pembuatan terowongan untuk ekskavasi arkeologi di bawah masjid Al-Aqsa, yang sebagian tembok di sana disebut sebagai tembok ratapan bagi warga Yahudi. Palestina menilai tindakan Israel ini sebagai pelecehan.

g. Resolusi 1322 (7 Oktober 2000)

Israel dikecam karena dianggap memicu terjadinya tindak kekerasan dengan kunjungan Ariel Sharon ke Masjid Al-Aqsa. Tindakan Sharon ini, yang saat itu sebagai pemimpin oposisi Israel, dianggap sebagai bentuk provokasi yang menyebabkan tewasnya 80 warga Palestina.

h. Resolusi 1397 (12 Maret 2002)

Kedua pihak, Israel dan Palestina, diminta menghentikan tindak kekerasan dan memulai proses perdamaian untuk mendirikan dua negara yang berdampingan dalam batas yang diakui. Kedua pihak diminta mendukung komite pencari fakta yang dipimpin mantan senator George J. Mitchell. Resolusi ini meminta pembekuan pemukiman Israel dan kerja sama untuk melindungi tempat suci di Yerusalem.

i. Resolusi 2334 (23 Desember 2016)

Israel dikutuk karena pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan termasuk di Kota Yerusalem. Pemukiman itu dinilai tidak memiliki validitas dan pelanggaran jelas terhadap hukum internasional. Pembangunan pemukiman itu juga menjadi hambatan bagi tercapainya solusi dua negara.

2. Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 478 Tahun 1980

Resolusi no. 478 tahun 1980 ini lahir atau tercipta dikarenakan Israel gagal atau tidak menjalankan apa yang diminta pada resolusi sebelumnya yaitu resolusi no. 476 tahun 1980. Dalam Resolusi no. 478 ini menegaskan bahwa akuisisi atau pengakuan secara paksa wilayah Yerusalem tidak dapat diterima oleh Dewan Keamanan PBB. Resolusi ini mengecam keras tindakan Israel yang membuat “basic law” tentang Yerusalem, dalam “basic law” yang di buat oleh Israel dijelaskan bahwa Israel mengakui status dari kota Yerusalem adalah ibu kota dari Israel, sedangkan sudah jelas bahwa Yerusalem bukanlah bagian dari negara Israel.

Oleh karena itu dalam resolusi ini juga dikatakan bahwa pemberlakuan “*basic law*” oleh Israel telah melanggar hukum internasional dan dengan pemberlakuan “basic law” ini tidak menjalankan penerapan lanjutan konvensi Jenewa terhadap perlindungan sipil pada saat perang terjadi. Pada Resolusi 478 ini Dewan Keamanan menentukan bahwa semua tindakan legislatif dan administratif yang dilakukan oleh Israel untuk mengubah status kota suci Yerusalem dan khususnya “basic law”, adalah

batal demi hukum dan harus segera dihentikan, Karena Dewan Keamanan PBB disini ingin mewujudkan perdamaian yang menyeluruh adil dan abadi di timur tengah. Sejumlah negara Afrika dan Amerika Latin tercatat pernah memiliki kedutaan besar di Yerusalem, beberapa di antaranya bahkan diperkirakan akan kembali. Sebelum tahun 1973, tiga negara yakni Pantai Gading, Zaire (kini Republik Demokratik Kongo) dan Kenya, disebut pernah memiliki kedutaan di Yerusalem. Namun se usai perang Yom Kippur antara Arab dan Israel, ketiganya memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel dan memindahkan misi mereka ke Tel Aviv. Belanda, Haiti dan sejumlah negara Amerika Latin mematuhi seruan PBB.⁶⁷

Dengan resolusi ini Dewan Keamanan PBB tidak mengakui “basic law” dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh Israel. Lalu Dewan Keamanan PBB menyerukan kepada setiap anggotanya untuk menerima keputusan ini, dan meminta kepada negara – negara yang mendirikan perwakilan diplomatik di Yerusalem untuk menarik semua perwakilannya dari kota suci Yerusalem, karena Yerusalem bukan milik negara Israel. Dapat disimpulkan bahwa dari Resolusi No. 478 tahun 1980 ini Dewan Keamanan PBB sudah sangat jelas melarang setiap negara untuk tidak menaruh perwakilan diplomatiknya di Yerusalem dan juga tidak mengakui “basic law” yang di buat oleh Israel.

⁶⁷<https://internasional.kompas.com/read/2018/05/14/22460621/ternyata-as-bukan-negara-pertama-yang-buka-kedutaan-di-Yerusalem> diakses pada, 18 Agustus 2018

3. Tindakan Amerika Serikat di Tinjau Dari Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 478

Pada tahun 1995 Amerika Serikat mengesahkan *Jerusalem Embassy Act of 1995* yang mana dalam undang – undang tersebut Amerika mengatur tentang pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Walaupun undang – undang ini sudah di sah kan oleh kongres Amerika tapi tidak dilaksanakan oleh Presiden Clinton, Bush, dan Obama. Mereka memandang UU ini sebagai bentuk campur tangan Kongres terhadap kewenangan kebijakan luar negeri Presiden yang sudah dimandatkan Konstitusi. Untuk mencegah berjalannya UU ini, para presiden Amerika tersebut mengeluarkan ketetapan presiden yang menunda pelaksanaan UU ini atas dasar keamanan nasional. Namun akhirnya presiden Donald Trump mengeluarkan satu ketetapan presiden penangguhan pada juni 2017, kemudian pada tanggal 6 desember 2017, ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memulai proses pemindahan kedutaan besarnya.

Dalam hukum internasional salah satu sumber hukumnya ialah Prinsip Hukum Umum menurut Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, yang dijelaskan bahwa asas hukum umum yang diakui oleh bangsa – bangsa yang beradab (*general principles of law recognized by civilized nation*). Ada beberapa prinsip – prinsip dalam Hukum Internasional antara lain *pacta sunt servanda*, prinsip *good faith*, prinsip *res judicata*, *good governace*, *retroaktif*, *nullum delictum nulla poena legenali*, *nebis in idem*, *clean*

government dan lain-lain.⁶⁸ Selain itu juga ada prinsip *non intervention*. Prinsip *Non-Intervention* mempunyai pengertian “*The non-intervention rule is a principle of international law that restricts the ability of outside nations to interfere with the internal affairs of another nation. At its core, the principle is a corollary to the right of territorial sovereignty possessed by each nation*”. Yang mana berarti suatu negara tidak boleh mencampuri urusan negara lain. Namun dalam kasus ini Amerika Serikat membuat suatu Undang – Undang dalam hal ini *Jerusalem Embassy Act 1995* yang mana berhubungan dengan permasalahan antara Israel dan Palestina sedangkan tidak diperbolehkan Undang – Undang suatu negara mengintervensi negara lain.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa – Bangsa No. 478 Tahun 1980 adalah resolusi yang membahas tentang wilayah Yerusalem dan PBB khususnya dewan keamanan PBB mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Israel di Yerusalem. Dapat dilihat dalam Paragraf 4 Angka 5 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa No 478 Tahun 1980 yang berisi:

“Decides not to recognize the “basic law” and such other actions by Israel that, as a result of this law, seek to alter the character and status of jarusalem and calls upon: a. All member states to accept this decision; b. Those states that have established diplomatic missions at Jarusalem to withdraw such missions from the Holy City;”

Dapat dilihat bahwa dalam resolusi ini, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk tidak mengakui “*basic law*” yang diterapkan oleh Israel dan segala aksi yang dilakukan oleh Israel berdasarkan aturan tersebut.

⁶⁸Sefriani, S.H., M.Hum, *Op. Cit.*, hlm. 49

Selanjutnya di dalam resolusi ini dewan keamanan PBB memutuskan untuk berusaha mengubah status yerussalem dan mewajibkan kepada semua negara dari member PBB yang menyetujui keputusan ini dan negara yang sudah mempunyai perwakilan diplomatiknya di Yerusalem untuk menarik kembali perwakilan negara tersebut dari kota suci yerussalem tanpa terkecuali.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Amerika dengan menaruh perwakilan diplomatiknya di yerussalem adalah sebuah kesalahan dan melanggar resolusi – resolusi Dewan Keamanan PBB yang dibuat untuk menentukan wilayah Israel dan tindakan ini tidak sesuai dengan resolusi no. 478 tahun 1980 yang dikeluarkan oleh dewan keamanan PBB yang ditunjukan pada paragraf 4 angka 5 huruf b, bahwa setiap negara yang mendirikan misi diplomatik di Yerusalem untuk segera menariknya dari kota suci Yerusalem, berarti tidak diperbolehkan adanya kantor Kedutaan Besar dan sejenisnya dari Negara manapun di Yerusalem yang mana dianggap sebagai kota suci dan tidak dimiliki oleh negara manapun.

B. Bagaimana Implikasi Yuridis Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem (Analisis Terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 Tahun 1980)

1. Kekuatan Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Seiring perkembangan kedinamisan, hukum internasional melahirkan suatu tatanan sumber hukum baru yaitu resolusi atau keputusan suatu organisasi internasional yang menurut kebiasaan internasional diakui oleh negara – negara di dunia saat ini. Keputusan – keputusan yang dikeluarkan dapat berasal dari organ eksekutif, legislatif, maupun yudikatif suatu organisasi internasional.⁶⁹ Istilah “resolusi” sebagaimana yang digunakan oleh PBB memiliki arti yang luas, yakni tidak hanya mencakup akan suatu rekomendasi melainkan juga keputusan.⁷⁰ Pada umumnya resolusi merupakan suatu pernyataan tercatat yang berisi kesepakatan oleh negara – negara.⁷¹ Dalam PBB sendiri mempunyai 2 jenis Resolusi, yaitu Resolusi Majelis Umum dan Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Resolusi Majelis Umum PBB yang berkaitan dengan masalah – masalah yang bersifat eksternal pada pokoknya adalah dalam bentuk rekomendasi – rekomendasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Piagam PBB. Dalam hal ini rekomendasi Majelis Umum diartikan sebagai nasihat yang ditujukan oleh PBB kepada pelaku atau sejumlah pelaku tertentu dalam dunia politik yang memintanya melaksanakan atau menahan diri dari pelaksanaan tindakan atau serangkaian tindakan tertentu tanpa tidak

⁶⁹ Mochtar Kusumaatmadja, Etty. R. Agoes, Op.Cit., hal. 154

⁷⁰ Marko Divac Oberg, The Legal Effect of Resolution of The UN Security Council and General Assembly in The Jurisprudence of The ICJ, 16 Eur.J.Int'l.L.2006. hal. 879.

⁷¹ Richard K.Gardiner, International Law, (England : Pearson Education Limited,2003), hal. 254.

menyatakan secara tidak langsung bahwa negara atau pelaku yang dituju dalam resolusi tersebut mempunyai suatu kewajiban hukum untuk dilaksanakan. Bentuk dari komunikasi politik internasional ini adalah berbentuk kerjasama sukarela dari para negara yang dapat diikat atau bertindak maupun menahan diri dari tindakan tanpa persetujuan sesuai dengan prinsip kedaulatan.⁷²

Dewan Keamanan PBB adalah salah satu lembaga yang memiliki pengaruh besar dalam penyelesaian sengketa internasional. Dewan Keamanan PBB adalah badan utama PBB yang memiliki peran penting.⁷³ Seluruh negara anggota PBB telah menyerahkan tugas utama kepada Dewan Keamanan (DK) PBB, untuk mengurus segala masalah mengenai penjagaan kehidupan internasional sekaligus untuk mencegah terjadinya pertikaian internasional agar tercipta situasi yang aman dan harmonis selaras dengan tujuan dan asas-asas Piagam PBB.⁷⁴ Walaupun anggota tetap Dewan Keamanan PBB hanya berjumlah 5 negara dan 10 anggota tidak tetap, namun tindakan – tindakan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB mewakili seluruh anggota PBB. Wewenang yang dimiliki Dewan Keamanan PBB adalah membuat keputusan yang mengikat pada anggota PBB sekaligus semua negara yang tidak termasuk anggota PBB.⁷⁵ Batasan hak Dewan Keamanan untuk memutuskan adalah dibatasi oleh suatu aturan yang mengharuskan adanya suara bulat dari semua anggota

⁷² Affandi Sitamala, Penyelesaian Sengketa Internasional melalui Majelis Umum PBB, [http://www.docstoc.com/mobile/doc/51765894/General Assembly](http://www.docstoc.com/mobile/doc/51765894/General%20Assembly). diakses tanggal 6 Agustus 2018.

⁷³ Boutros-Gali, *An Agenda for Peace*, New York : United Nations, 1992, hlm. 33

⁷⁴ Ibid hlm. 33

⁷⁵ Danial, 2012, *Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional*, Banten : Universitas Sultan Agung Tirtayasa, hlm.2231

(*rule of unanimity*) atau biasa disebut dengan “*veto*”, lima anggota Dewan Keamanan PBB berhak menolak usulan yang sifatnya non prosedural yang diajukan Dewan Keamanan sehingga kelima anggota termasuk amandemen terhadap piagam.⁷⁶ Selain itu Dewan Keamanan PBB harus dapat menjalankan fungsinya setiap waktu dan Dewan Keamanan PBB pun mendapatkan hak untuk menentukan sendiri aturan atau tata caranya berdasarkan Piagam PBB. Salah satu tugas Dewan Keamanan PBB adalah menyelesaikan sengketa internasional yang terjadi dengan cara mengeluarkan keputusan – keputusan yang berupa resolusi – resolusi Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB mempunyai beberapa fungsi dan tugas menurut pasal 24 – 26 Piagam PBB antara lain :⁷⁷

- a. Menjaga perdamaian dan keamanan internasional agar selaras dengan asas – asas dan tujuan PBB
- b. Melakukan penyelidikan terhadap tiap-tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan ketegangan internasional
- c. Memberikan masukan-masukan serta cara-cara tentang penyelesaian sengketa.
- d. Membuat rumusan mengenai rencana dalam rangka penetapan suatu sistem persenjataan.
- e. Memberitahukan jika terjadi ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi serta memberi usulan tentang tindakan apa yang harus diambil.

⁷⁶*ibid*

⁷⁷ UN Charter

- f. Memberikan sanksi ekonomi atau tindakan lain untuk menghindari terjadinya perang serta menghentikan agresor.
- g. Melakukan aksi militer terhadap seorang aggressor
- h. Mengusulkan pemasukan anggota – anggota baru dan syarat-syarat dengan negara-negara mana yang dapat menjadi pihak dalam statuta mahkamah internasional.
- i. Menjalankan fungsi-fungsi perwakilan PBB di daerah strategis
- j. Memberi usulan kepada majelis umum mengenai pengangkatan seorang sekretaris jendral, dan bersama-sama dengan majelis umum, melakukan pengangkatan para hakim dari mahkamah internasional
- k. Memberikan laporan tahunan kepada majelis umum

Resolusi Dewan Keamanan PBB adalah keputusan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dalam pemeliharaan dan atau pemulihan perdamaian dan keamanan internasional yang mempunyai kekuatan mengikat yang pada hakikatnya merupakan pencerminan suatu legitimasi internasional yang dikehendaki oleh prinsip dan tujuan PBB sesuai dengan piagam PBB. Tapi faktanya ada negara – negara yang sedang bersengketa yang tidak mengindahkan resolusi Dewan Keamanan tersebut walaupun dalam piagam PBB sudah tercantum dengan jelas tentang kekuatan mengikat dari resolusi tersebut terhadap negara – negara yang terlibat dalam sengketa internasional dan juga sanksi – sanksi bagi negara yang tidak menaati resolusi tersebut. Sanksi tersebut bisa merupakan tindakan yang menggunakan kekerasan

tanpa kekuatan militer (pasal 41 piagam PBB) dan tindakan yang menggunakan kekuatan militer⁷⁸

Letak kekuatan mengikat dari resolusi Dewan Keamanan PBB terdapat pada Piagam PBB di dalam pasal 25 yang menyatakan “*The members of the United Nations agree to accept carry out the decisions of the Security Council in accordance with present Charter*”. Yang mana disebutkan bahwa semua negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan – keputusan Dewan Keamanan serta pada pasal itu pula, Dewan Keamanan mempunyai kekuasaan untuk memutuskan keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat termasuk keputusan tersebut adalah resolusi Dewan Keamanan PBB. Perihal ini membawa konsekuensi bahwa sadar atau tidak sadar, apapun keputusan yang dikeluarkan DK PBB sehubungan dengan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang terkait berkewajiban untuk melaksanakannya.⁷⁹

Dalam proses pengambilan keputusan yang berupa resolusi harus memenuhi syarat sesuai Pasal 27 Piagam PBB agar sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Dalam pasal 27 disebutkan suatu resolusi Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian suatu sengketa internasional sebagai hasil dari sidang yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB sah apabila telah disetujui oleh suara sembilan negara anggota Dewan Keamanan PBB termasuk lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tanpa ada veto dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut.

Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Piagam PBB, semua keputusan Dewan

⁷⁸ Sri Setianingsih Suwardi, 2006, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99

⁷⁹ Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 99

Keamanan (resolusi DK) dalam hal menyelesaikan sengketa internasional memerlukan suara yang menyatakan sembilan anggota Dewan Keamanan PBB termasuk kebulatan suara dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB karena termasuk ke dalam keputusan yang merupakan masalah yang bukan prosedural. Karena termasuk ke dalam keputusan yang merupakan masalah yang bukan prosedural, masih dimungkinkan adanya veto dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB karena dalam masalah yang bukan prosedural harus ada persetujuan dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi adanya veto dari anggota tetap dapat mencegah adopsi atau disetujuinya suatu proposal sekalipun hal itu telah memenuhi jumlah suara yang mendukung (sebanyak 9 suara anggota Dewan Keamanan PBB). Jika salah satu dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengeluarkan veto maka membuat suatu resolusi tersebut tidak diberlakukan dan tidak punya kekuatan mengikat secara hukum.⁸⁰

Resolusi Dewan Keamanan tersebut mengikat bukan hanya kepada negara anggota PBB tetapi kepada negara-negara bukan anggota PBB sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (6) yaitu "*The Organization shall ensure that states which are not members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security*".⁸¹ Berdasarkan pasal tersebut, suatu negarayang bukan anggota PBB maupun bukan anggota Dewan Keamanan PBB dapat juga dikenai kewajiban untuk melaksanakan dan terikat dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, terlebih lagi negara

⁸⁰ Sri Setianingsih Suwardi, 2004, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h..165

⁸¹ Ibid, h.19

tersebut merupakan salah satu pihak yang bersengketa atau menurut sidang Dewan Keamanan PBB negara tersebut telah melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Pada saat suatu negara tidak dapat mentaati atau melanggar suatu resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB maka Dewan Keamanan PBB dapat mengeluarkan sanksi baik secara non militer ataupun secara militer. Hal ini diatur dalam pasal 41 dan pasal 42 Piagam PBB. Dalam pasal 41 piagam PBB dituliskan bahwa *“the Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations”*. Dalam pasal ini diatur mengenai tindakan kekerasan tanpa menggunakan kekuatan militer. Tindakan tersebut meliputi tindakan pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan dalam bidang ekonomi, termasuk hubungan darat laut, udara, pos, dan telegraf, dan alat – alat komunikasi yang lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik.

Bilamana dalam usaha yang didasarkan pada pasal 41 piagam PBB tidak tercapai maka akan diambil tindakan berdasarkan pasal 42 piagam PBB yang menyebutkan bahwa *“Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such*

action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations'. Pada pasal 42 ini menentukan bila usaha yang didasarkan pada pasal 41 tidak cukup untuk memberikan efek pada negara yang dijatuhkan sanksi, maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan dengan menggunakan angkatan darat, laut, dan udara yang mungkin dibutuhkan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa *power of enforcement* dari Dewan Keamanan PBB kepada negara – negara yang terlibat sengketa internasional untuk mentaati resolusi Dewan Keamanan PBB demi terjaganya keamanan dan perdamaian internasional.

2. Implikasi Yuridis Bagi Amerika Serikat (Analisis Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 478 Tahun 1980)

Sejak didirikannya negara Israel pada tahun 1948, kota Yerusalem terbagi menjadi dua. Antara Kawasan bagian barat yang dikuasai Israel dan Kawasan bagian timur yang berada di bawah pengawasan aliansi Yordania-Arab. Kota Yerusalem pun secara resmi berada dalam pengawasan PBB, namun pada tahun 1950 parlemen Israel secara sepihak mendeklarasikan kota Yerusalem sebagai ibukota negara Israel. Tindakan ini jelas telah melanggar hukum internasional, yang mana pada tahun 1980 akhirnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No. 478 tahun 1980 dimana dalam resolusi ini dengan jelas mengatakan bahwa tidak menerima *basic law* yang diterapkan oleh *Knesset* Israel dan bahwa tindakan Israel mengakui Yerusalem sebagai ibukota negara mereka telah melanggar

hukum internasional karena kota Yerusalem dibawah pengawasan PBB dan mempunyai status sebagai "Kota Suci".

Tindakan pelanggaran terhadap resolusi ini tidak hanya dilakukan oleh Israel saja namun Amerika Serikat pun melanggar resolusi ini dengan pada tahun 1995 Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang – Undang tentang pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat untuk Israel ke Yerusalem. Tindakan yang dilakukan Kongres Amerika ini sudah melanggar Resolusi No. 478 tahun 1980 walaupun kebijakan dari Undang-Undang ini belum dijalankan. Namun pada akhir 2017 Presiden Amerika Donald Trump menjalankan Undang – Undang ini dengan memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang mana sangat melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 yang menyatakan dalam pasal 5 huruf b bahwa semua negara anggota PBB yang mempunyai perwakilan diplomatik di Yerusalem untuk di tarik kembali dan tidak dapat membuat atau membuka kantor perwakilan diplomatiknya di Yerusalem. Berarti sudah sangat jelas bahwa Amerika Serikat melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 Tahun 1980 yang mana Amerika sendiri tergabung di dalam Dewan Keamanan. Dengan dilanggarnya Resolusi Dewan Keamanan tersebut maka seharusnya ada sanksi yang jelas dari Dewan Keamanan PBB untuk Amerika Serikat.

Dalam pasal 25 Piagam PBB disebutkan bahwa setiap anggotanya untuk menerima dan melaksanakan keputusan – keputusan dari dewan keamanan termasuk resolusi Dewan Keamanan, yang dimana ini termasuk Amerika Serikat namun seperti yang di jelaskan sebelumnya Amerika telah

melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 478 tahun 1980. Selain melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 tahun 1995 Amerika juga melanggar Prinsip Hukum Internasional yaitu prinsip *non intervention* yang dapat diartikan bahwa suatu negara tidak dapat mengintervensi negara lain sedangkan Amerika Serikat dengan membuat *Jerusalem Embassy Act* yang mana ini adalah tindakan nasionalnya, sudah sangat jelas melanggar prinsip non intervensi.

Hukum internasional mengartikan intervensi dalam arti tidak berarti luas sebagai segala bentuk campur tangan negara asing dalam urusan suatu negara, melainkan berarti sempit, yaitu suatu campur tangan negara asing yang bersifat menekan dengan alat kekerasan (*force*) atau dengan ancaman melakukan kekerasan, apabila keinginannya tidak terpenuhi.⁸² Oppenheim Lauterpacht⁸³, mengatakan bahwa intervensi sebagai campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi atau barang di negeri tersebut. J.G. Starke⁸⁴ sendiri mengemukakan ada tiga tipologi dalam melihat sebuah intervensi negara terhadap negara lain yaitu:

- a. Intervensi internal, yaitu intervensi yang dilakukan sebuah negara dalam urusan dalam negeri negara lain.
- b. Intervensi Eksternal, yaitu intervensi yang dilakukan sebuah negara dalam urusan luar negeri sebuah negara lain.

⁸²Wirjono Prodjodikoro, Azaz-azaz Hukum Publik Internasional, Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1967, hlm 149-150.

⁸³Huala Adolf, Aspek - Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, cet.ketiga, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.31.

⁸⁴J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, Op.cit., hlm.136-137.

- c. Intervensi Punitive, yaitu intervensi sebuah negara terhadap negara lain sebagai balasan atas kerugian yang diderita oleh negara tersebut.

J.G. Starke mengatakan intervensi ini dengan istilah *subversive intervention* yaitu:

“Mengacu kepada propaganda atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk mendorong terjadinya revolusi atau perang saudara di negara lain”.⁸⁵

Prinsip non intervensi sendiri merupakan suatu kewajiban bagi setiap negara berdaulat untuk tidak campur tangan dalam urusan negara lain.⁸⁶ Prinsip ini dijalankan karena suatu negara memiliki kedaulatan penuh yang didasari oleh paham kemerdekaan dan persamaan derajat sesama negara, artinya bahwa negara berdaulat bebas dari negara lainnya dan juga sama derajatnya dengan yang lain.⁸⁷ Piagam PBB sendiri telah mengatur prinsip kedaulatan negara dan non intervensi dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “organisasi ini (PBB) berdasarkan prinsip kesetaraan kedaulatan dari semua negara anggota”.⁸⁸ Lalu merujuk pada pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang menyatakan bahwa “*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.*” maka tindakan Amerika Serikat

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶Steven L. Spiegel, *World Politics in A New Era*, New Jersey : Harcourt Brace College Publishers, 1995, hlm. 395.

⁸⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional, Opcit*, hlm. 19.

⁸⁸Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa - Bangsa

tidak sesuai dengan tujuan PBB yang menetapkan bahwa Yerusalem adalah kota suci dan bukan milik negara manapun dan juga menyalahi *territorial integrity*. Dalam Pasal 2 ayat 5 yang berbunyi “*All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.*”

Karena telah melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB dan Prinsip Hukum Internasional Non – Intervention, PBB harus menegur Amerika Serikat terlebih dahulu, apabila Amerika tetap tidak memindahkan Kedutaannya maka PBB dapat menjatuhkan sanksi pada Amerika Serikat dengan menerapkan sanksi – sanksi yang diatur dalam pasal 41 dan 42 Piagam PBB. Menurut pasal 41 memberikan sanksi tanpa menggunakan kekuatan militer dengan cara pemutusan seluruh atau sebagian hubungan dalam bidang ekonomi yang mana disebut juga embargo ekonomi jadi PBB dapat melakukan embargo ekonomi terhadap Amerika Serikat dengan negara anggota PBB melakukan pembatasan Ekspor dan Impor untuk Amerika Serikat. selanjutnya pada pasal 41 ini meliputi pemutusan hubungan diplomatik yang mana PBB dapat memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat. Apabila dalam usaha yang didasarkan pada pasal 41 Piagam PBB tersebut tetap tidak dilakukan perubahan oleh Amerika Serikat maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan dengan menggunakan angkatan darat, laut, dan udara

yang mungkin dibutuhkan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan pasal 42 Piagam PBB.



BAB V

PENUTUP

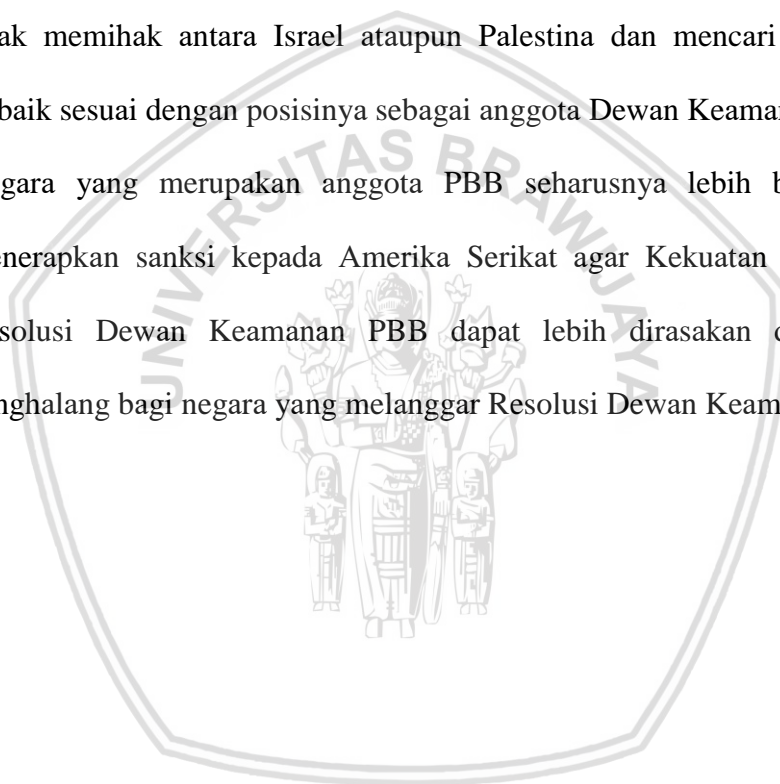
A. Kesimpulan

1. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Amerika dengan menaruh perwakilan diplomatiknya di yerussalem adalah sebuah kesalahan dan melanggar resolusi – resolusi Dewan Keamanan PBB yang dibuat untuk menentukan wilayah Israel dan tindakan ini tidak sesuai dengan resolusi no. 478 tahun 1980 yang dikeluarkan oleh dewan keamanan PBB yang ditunjukan pada paragraf 4 angka 5 huruf b, bahwa setiap negara yang mendirikan misi diplomatik di Yerusalem untuk segera menariknya dari kota suci Yerusalem, berarti tidak diperbolehkan adanya kantor Kedutaan Besar dan sejenisnya dari Negara manapun di Yerusalem yang mana dianggap sebagai kota suci dan tidak dimiliki oleh negara manapun.
2. Karena telah melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB dan Prinsip Hukum Internasional Non – Intervention, PBB harus menegur Amerika Serikat terlebih dahulu, apabila Amerika tetap tidak memindahkan Kedutaannya maka PBB dapat menjatuhkan sanksi pada Amerika Serikat dengan menerapkan sanksi – sanksi yang diatur dalam pasal 41 dan 42 Piagam PBB. Menurut pasal 41 memberikan sanksi tanpa menggunakan kekuatan militer dengan cara pemutusan seluruh atau sebagian hubungan dalam bidang ekonomi yang mana disebut juga embargo ekonomi jadi PBB dapat melakukan embargo ekonomi terhadap Amerika Serikat dengan negara anggota PBB melakukan pembatasan Ekspor dan Impor untuk

Amerika Serikat. selanjutnya pada pasal 41 ini meliputi keputusan hubungan diplomatik yang mana PBB dapat memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat.

B. Saran

1. Demi perdamaian dan keamanan Internasional seharusnya Amerika Serikat mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB dan bersifat lebih netral dengan tidak memihak antara Israel ataupun Palestina dan mencari solusi yang terbaik sesuai dengan posisinya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB.
2. Negara yang merupakan anggota PBB seharusnya lebih berani untuk menerapkan sanksi kepada Amerika Serikat agar Kekuatan Hukum dari Resolusi Dewan Keamanan PBB dapat lebih dirasakan dan menjadi penghalang bagi negara yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian**, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ade Maman Suherman, 2003, **Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- A. Masyhur Effendi, 1980, **Tempat Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional atau Nasional**, P.T Alumni, Bandung.
- Ali Sastroamidjojo, 1971, **Pengantar Hukum Internasional**, P.T Alumni, Bandung.
- Boer Mauna, 2000, **Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, P.T Alumni, Bandung.
- Breger Marshall J, 2002, **Jerusalem: A city and Its Future**, Ora Ahimier Syracuse University Press, Syria.
- Chairul Anwar, 1988, **Hukum Internasional: Pengantar Bangsa-Bangsa**, Djambatan, Jakarta.
- Fred Halliday, 2005, **The Middle East in Internatinal Relations**, United States of America: Cambridge University Press, Cambridge.
- Hata, 2012, **Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Pasca Perang Dingin**, Setara Press, Malang.
- Huala Adolf, 2004, **Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huala Adolf, 2002, **Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional cet Ketiga**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jerome Slater, 2001, **What Went Wrong? The Collapse of The Israeli-Palestinian Peace Process**, Political Science Quarterly, UK.
- J. G Starke, 2010, **Pengantar Hukum Internasional I Edisi Kesepuluh**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masyur Effendi, 1993, **Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa**, Usaha Nasional, Surabaya.
- Martin Dixon, 2000, **Texbook on International Law: Fourth Edition**, Blackstone Press Limited, New York.

- Michael Akehurst, 1983, **A Modern Introduction to International Law**, Geoge Allen 7 Unwin Publisher Ltd, UK.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2003, **Pengantar Hukum Internasional**, P.T Alumni, Bandung.
- SumaryoSuryokusumo, 1995, **Hukum Diplomatik dan Konsuler: Teori dan Kasus**, P.T Alumni, Bandung.
- Sam Suhaidi, 1969, **A Concise History of The Law of Nations**, Grafindo, Bandung.
- Samin Zakaria, 1987, **Tinjauan Tentang Syarat-Syarat Dalam Proses Pembentukan Hukum Kebiasaan Internasional**, FH Parahyangan, Bandung.
- Sunaryati Hartono, 1991, **Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional**, Alumni, Bandung.
- Sri Setyaning Suwardi, 2004, **Pengantar Organisasi Internasional**, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sri Setyaning Suwardi, 2006, **Penyelesaian Sengketa Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1967, **Azaz-azaz Hukum Publik Internasional**, P.T Pembimbing MA, Jakarta.

JURNAL

- Richard K.Gardiner, **International Law**, (England : Pearson Education Limited,2003)
- Avi Shlaim, 1994, **The Oslo Accord Journal of Palestine Studies**, hlm. 25
- Bryan A Garner, **Black's Law Dictionary** hlm 457
- James Barros, **United Nation, Past,Present and Future**, diterjemahkan oleh D.H.Gulo, **PBB, Dulu,kini dan Esok**, Edisi Pertama, hlm 64

INTERNET

- <http://www.docstoc.com/mobile/doc/51765894/General> Assembly. diakses tanggal 6 Agustus 2018
- <http://kabar24.bisnis.com/read/20171208/19/716466/9-resolusi-dewan-keamanan-pbbmenyangkut-status-Yerusalem> diakses pada tanggal 5 Agustus 2018

<https://internasional.kompas.com/read/2018/05/14/22460621/ternyata-as-bukan-negara-pertamayang-buka-kedutaan-di-Yerusalem> diakses pada, 18 Agustus 2018

URL: <http://www.globalissues.org/Geopolitics/MiddleEast.asp.html>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2018

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Resolusi Dewan Keamanan PBB

Konvensi Wina 1961

Statuta Mahkamah Internasional

UN Charter (Piagam PBB)

